

346.0628  
HAT  
m e

**MERGER PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG  
TIMBUL BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM  
MERGER PERSEROAN TERBATAS**



**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi  
Persyaratan Mencapai Gelar Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**

**Oleh :**

**Lathifah Hanim, SH, M.Hum.  
B4B.00.1150**

**Pembimbing :  
Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

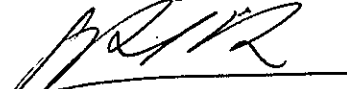
## PERSETUJUAN TESIS

### MERGER PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS

Yang disusun oleh :  
Lathifah Hanim, SH,M.Hum.  
B4A.00150

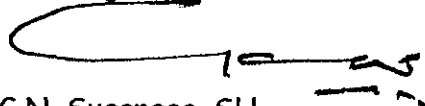
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 17 Februari 2004  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

Semarang, 17 Februari 2004  
Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP  
Ketua Program,



Prof. I.G.N. Sugangga, SH.

## MOTTO & PERSEMBAHAN

HAKEKAT PENDIDIKAN  
ADALAH  
KEMAUAN DAN KEMAMPUAN  
UNTUK MENDIDIK DIRI SENDIRI

SESUDAH KESULITAN  
PASTI DATANG KEMUDAHAN

dari hati yang jernih dan perasaan yang tulus  
aku persembahkan tesis ini

kepada :

mami Ami Soehaimi dan papa Soehaimi  
saudaraku m' atik, cips, yayah, dede oii...

tak lupa, yang pernah membesarkanku :  
TK Bhayangkari Demak, SDN Bintoro II Demak,  
SMPN III Demak, SMUN I Demak,  
almamaterku Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,  
Program Magister Ilmu Hukum UNDIP dan  
Program Magister Kenotariatan UNDIP.

tempat aku mencari "bekal hidup" & pengalaman :  
Fakultas Hukum UNISSULA Semarang  
Kantor Advokat & Pengacara "D.DJUNAEDI, SH & REKAN"

khususon ntuk, yang kusayang  
"calon suami"  
thanks atas doanya

sekollega di UNISSULA,  
rekan-rekan Advokat di IKADIN dan  
kawan seperjuangan di HMI dan REMASADE

(terimakasih atas segalanya)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Wa Syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hanya berkat ridho-Nya, penyusunan tesis ini dapat selesai tanpa halangan yang berarti. Dan, semata hidayah-Nya pula, tesis yang berjudul "MERGER PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS", dapat tersusun dari apa yang diharapkan.

Melalui perjalanan panjang dan perjuangan yang melelahkan, telah penulis rasakan dalam menghadapi berbagai "*godaan*", namun dengan berlalunya waktu, langkah demi langkah terlewati sampai tiba pada akhir penyusunan tesis ini. Akan tetapi semuanya ini dapat penulis lalui berkat perhatian dan bantuan dari semua pihak, baik yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, kritik, saran maupun dukungan moril selama masa studi hingga akhir penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing, Tim Review Proposal dan Tim Penguji, penulis menyampaikan maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam proses pembimbingan, Review dan Penilaian tesis ini, ada ucapan atau sikap penulis yang kurang berkenan.

Kiranya hanya penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

- Bapak Rektor beserta segenap Pembantu Rektor UNDIP yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan penulis untuk mengikuti studi pada program Magister Kenotariatan UNDIP.
- Pimpinan program Magister Kenotariatan UNDIP Bapak Prof.I.G.N.Sugangga, SH, beserta sekretaris programnya bapak R.Suharto, SH, M.Hum dan staf administrasi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan UNDIP.
- Ibunda Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH. yang dengan sabar telah membimbing tesis, dari awal sampai selesainya tesis ini.
- Bapak dan ibu dosen Magister Kenotariatan UNDIP yang telah "*mentransfer*" ilmu pengetahuannya kepada penulis.
- Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PT. Bank Danamon, Tbk, PT. Bank Permata, Notaris

Anisah, SH; Notaris Nanik, SH; Notaris Cahyo Adi, SH; Notaris Aris Widhi Hidayat, SH, Notaris Edi Riyanto, SH; Advokat D. Djunaedi, SH, Sp.N; Advokat Andreas Haryanto, SH,CN; Advokat Agus Nurudin, SH,CN; Advokat Lukman Hakim, SH; dan Advokat Dewi Harastuti, SH, M, Hum.

- Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Rasa hormat,terimakasih dan mohon maaf penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, khususnya kepada mami tersayang Hj. Ami Soehaimi, papa tersayang H. Soehaimi, m' Atik, Cip, Yayah, dede Oiii,... berikut om-om dan tante-tante keluarga besar Bustam Adlan dan Sulaiman yang dengan penuh kasih sayang telah memberikan perhatian kepada penulis.

Terimakasih kepada pak Djun, pak Andre, mas Lukman, bu Dewi, dan Bul atas "*waktu*" yang diberikan kepada penulis yang selalu minta ijin meninggalkan pekerjaan di Jl. Pattimura No.6A Semarang, kantor Advokat "D. DJUNAEDI, SH & REKAN", untuk bolak-balik dengan rute Pattimura-Unissula-Undip-Pattimura-Undip.

Secara khusus penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Advokat Agus Nurudin, SH,CN. beserta keluarga, atas "*segala sesuatu*" yang telah diberikan kepadaku. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Ketua Panwaslu Jawa Tengah pak Nur Hidayat Sardini, S.Sos (NH.Dini), ternyata aku sebagai pemenangnya.. Juga kepada "papa Lie", thanks atas "*motivasi*" dan traktir duriannya.

Ungkapan terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat baruku di Unissula, dik Anis, bang Jawade, Bambang TB serta seniorku bapak dan ibu dosen fakultas hukum Unissula, juga kepada Sekretaris Program S2 Notariat UNDIP pak Harto, SH, M.Hum, terimakasih atas bimbingan dan motivasi ke-S3nya.

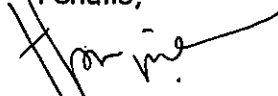
Tak lupa kepada teman-teman di magister kenotariatan UNDIP Diana tantri, H.Agung dan teman-teman angkatan 2001, juga buat Asprie, semoga termotivasi melanjutkan S2 Notariatnya.

Khususon ntuk sahabat bermainku "dik Ifa", Deasy, om Koes, Anie, Ita, Ovi, Misbah, Denok, Taryono, Santi, Wahyu, Nina, mpok Mira, Anik, Yanti, bang Ali, Nurien, terimakasih atas segalanya.

Semoga kiranya tesis ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum perusahaan, khususnya dalam bidang Merger Perseroan Terbatas. "*Tidak Ada Gading Yang Tak Retak*", begitu pula dalam penyusunan tesis ini, mungkin banyak hal yang kurang sempurna, kiranya penulis mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca. Terimakasih.

Semarang, 17 Februari 2004

Penulis,



Lathifah Hanim, SH. M.Hum.

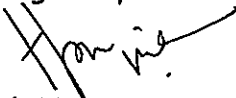
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Februari 2004

Yang Menyatakan



Lathifah Hanim, SH.M.Hum.

## ABSTRACT

Merger is a legal action that is done by a Limited or, furthermore, to rejoin itself to other existing Limited and for the next, the self-joining limited is dismissed. It is ruled in the Act (UU) Number 1, 1995 article 102 to 109, and Government Regulation (PP) Number 27, 1998 about the Merging, Merger, and Taking Over of Limited.

There are several problems; how the implementation of Limited Merger and the legal cause emerged to the stockholder, employee, creditor, and community by the presence of Limited Merger, the Board of Director's responsibilities and assignments in the framework of giving legal protection for the stockholders, employees, creditors, and community in implementing Limited Merger are and how the form of legal protection for the stockholders, employees, creditors, and community in the implementation of Limited Merger is.

The implementation of Limited Merger instead based on the Act (UU) Number 1, 1995 and Government Regulation (PP) Number 27, 1998, also prevails the special stipulation of "lex specialis". Merger is an alternative for the developing of company to obtain the increased of efficiency, a wider market share and distribution path, but on the other side Limited Merger can cause a legal cause that is harmful for certain parties. In providing legal protection to the prejudice parties in Limited Merger, the Director and Commissioner have a very important, central, and strategic role. The assignments and responsibilities of Director and Commissioner have started since the arrangement of Limited Merger Proposal to the fulfillment of all rights of prejudice parties caused by the implementation of Limited Merger. In the matter of Limited Merger, the minority stockholders, employees, creditors, and community have a weak position, so the parties are frequently prejudice. To anticipate the negatif cause of Limited Merger, the Act (UU) Number 1, 1995, and Government Regulation (PP) Number 27, 1998 properly provide a legal protection to prejudice partys. Instead of legal protection given to the both Acts, there are also several other stipulations that also give legal protection to prejudice parties in Limited Merger.



## ABSTRAK

Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Diatur dalam UU No. 1 Th.1995 Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, dan PP No. 27 Th 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Ada beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas, kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas selain didasarkan pada UU No.1 tahun 1995 dan PP No.28 tahun 1998, berlaku juga ketentuan khusus "*lex specialis*". Merger merupakan suatu alternatif bagi pengembangan perusahaan agar diperoleh peningkatan efisiensi, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan memperoleh jalur distribusi, tetapi pada sisi lain Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, Direktur dan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis. Kewajiban dan tanggungjawab Direktur dan Komisaris dimulai sejak penyusunan usulan rencana Merger Perseroan Terbatas sampai dipenuhinya segala hak dari pihak-pihak yang dirugikan yang timbul dari pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas. Dalam hal Merger Perseroan Terbatas pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan masyarakat mempunyai kedudukan yang lemah, maka pihak-pihak tersebut sering dirugikan. Untuk mengantisipasi akibat negatif Merger Perseroan Terbatas, UU No.1 th 1995 dan PP No.27 th 1998 telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa ketentuan lainnya yang juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas.

--- Han's ---

B.	AKIBAT HUKUM MERGER PERSEROAN TERBATAS -----	68
1.	Keuntungan dan Kerugian Merger Perseroan Terbatas -----	68
1.1.	Keuntungan Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Merger Perseroan Terbatas -----	68
1.2.	Keuntungan dan Kerugian Merger Perseroan Terbatas Bagi Perekonomian -----	72
2.	Akibat Hukum Merger Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Th. 1995 Tentang Perseroan Terbatas -----	76
2.1.	Akibat Hukum Terhadap Perseroan Yang Terlibat Merger	79
2.2.	Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas ---	82
2.3.	Akibat Hukum Terhadap Karyawan -----	83
2.4.	Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga -----	84
2.5.	Akibat Hukum Terhadap Masyarakat -----	85
C.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS -----	86
1.	Kepentingan Pihak-Pihak Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas -----	86
2.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas -----	88
3.	Perlindungan Hukum Yang Diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas. -----	96
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN -----	103
1.	Metode Pendekatan -----	104
2.	Spesifikasi Penelitian -----	105
3.	Lokasi Penelitian -----	105
4.	Jenis dan Sumber Data -----	105
5.	Teknik Pengumpulan Data -----	106
6.	Pengumpulan Data -----	107
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	108
A.	HASIL PENELITIAN -----	108
1.	Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas -----	108
1.1.	Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas -----	108
1.2.	Akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas -----	122
1.	Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas -----	125
2.	Akibat Hukum Terhadap Karyawan -----	126
3.	Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kreditur) -----	127
4.	Akibat Hukum Terhadap Masyarakat -----	128
2.	Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas -----	129
3.	Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan,	

kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas -----	137
B. PEMBAHASAN -----	147
1. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas: -----	147
1.1. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas -----	147
2.2. Akibat Hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas -----	164
1. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas -----	167
2. Akibat Hukum Terhadap Karyawan -----	168
3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kreditur) -----	168
4. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat -----	170
2. Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas -----	181
3. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas -----	189
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN -----	198
A. Kesimpulan -----	198
B. Saran -----	199
DAFTAR PUSTAKA -----	201
BIO DATA PENULIS -----	208

## DAFTAR TABEL

Tabel.1. Permohonan pengesahan akta pendirian dan pelaporan akta perubahan Anggaran Dasar dan merger perseroan terbatas yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari tahun 1998 – 2002 ----- hal. 108

Tabel.2. Perseroan Terbatas yang telah melakukan Merger dari tahun 1998 – 2002 ----- hal. 110

Tabel.3. Pendapat Notaris tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditur dalam merger perseroan terbatas ----- hal. 138

--- Han'S ---

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perseroan Terbatas sebagai institusi<sup>1</sup> dalam dunia usaha dan perdagangan sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, mempunyai posisi sentral, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Untuk itu sangat perlu diupayakan penciptaan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi Perseroan Terbatas untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai suatu institusi (badan hukum), sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diharapkan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang berazaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu pelaku usaha, Perseroan Terbatas diharapkan ikut menggerakkan dan mengarahkan kegiatan di bidang ekonomi, sehingga perlu diupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien yang memungkinkan Perseroan Terbatas dapat tumbuh dan berkembang secara lebih

---

<sup>1</sup> A. Corporation is a sociological institution as well as a collection of financial assets, Herry F. Myers, "Will Mergers Help or Hurt in the Run" Wall Street Journal (May 2, 1988).

dinamis dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat cepat.

Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya perlu melakukan suatu pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu:<sup>2</sup>

1. Ekspansi internal "*Internal Expansion*", pengembangan perusahaan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas hasil produksi serta distribusi hasil produksi yang sudah ada; atau
2. Ekspansi eksternal "*External Expansion*", pengembangan perusahaan yang dilakukan dengan cara penggabungan usaha "*merger*", pengambilalihan "*acquisition*" dan peleburan usaha "*consolidation*".

Ekspansi Internal dalam pengembangan perusahaan dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan cara diversifikasi dan ekstensifikasi usaha. Pengembangan perusahaan yang menggunakan cara diversifikasi yaitu dengan jalan mengadakan perbaikan-perbaikan atau melakukan inovasi pada produk-produk yang dihasilkan. Sedangkan pengembangan perusahaan dengan cara ekstensifikasi dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan atau menambah faktor-faktor produksi, misalnya dengan meningkatkan modal, alih teknologi, memperbaiki manajemen.

Sedangkan dalam ekspansi internal, juga dapat dilakukan dengan jalan ekspansi dengan cara melakukan restrukturisasi perusahaan, misalnya Merger usaha, peleburan

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan, Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam rangka Dies Natalis ke-41, Semarang, tgl. 28 Nopember 1998, hal.2

usaha dan pengambilalihan saham. Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan dalam rangka pengembangan perusahaan selain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, restrukturisasi perusahaan juga berfungsi untuk meningkatkan sinergi perusahaan.<sup>3</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, telah memberikan peluang pada Perseroan Terbatas untuk melakukan restrukturisasi perusahaan, baik dengan cara penggabungan (Merger) perusahaan, peleburan dan pengambilalihan saham. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pelaksana Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Definisi penggabungan atau lebih dikenal dengan "Merger" (untuk selanjutnya disebut "Merger"), secara formal baru digunakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana definisi Merger dapat kita jumpai dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

"Penggabungan (Merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar"

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.51.

Ada beberapa alasan perusahaan melaksanakan Merger dan Akuisisi, antara lain:

1. Expansion (of exsisting or related business, i.e. to increase market share or to become more competitive); normally faster and cheaper than internal expansion.
2. Synergetic benefits (to complements existing business); normally to generate value added, i.e. efficiency, economies of scale, economies of scope.
3. Diversification (into other line of business); normally to capture opportunities or diversity business risk.
4. Hubris (pride of management or share holder).
5. Belief to be able to operate target company more efficiently and productively;
6. Target company is financially "undervalued" (i.e. rapaidiy growing cash flow and earnings, low P/E, market value significantly less than book value, high liquidity, low leverage).
7. Tax purpose (i.e. tax on transferable losses).
8. Possible lower of capital (due to bigger size of operations).
9. Lower financial risk (i.e. reduced risk of cash streams if the merged company is in different line of business).
10. Market forces on forced to do so (involuntary).<sup>4</sup>

Berdasarkan ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan yang ada dalam perseroan hasil Merger, konsolidasi atau akuisisi, ada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang berkaitan secara hulu ke hilir (vertikal) dan ada pula perusahaan yang bidang usahanya tidak berkaitan (horizontal).<sup>5</sup> Sebagai suatu institusi, Merger titik beratnya pada

---

<sup>4</sup> Patrick Gaughan, *Mergers, Acquistions and Corporate Restructuring*, John Wiley and Sons, Inc, New York. 1996.

<sup>5</sup> Kwik Kian Gie, *Sinergis dan Kemungkinan Penyalahgunaan Merger dan Akuisisi pada Unit-Unit dalam suatu Group Bisnis*, Makalah, tgl. 5 Februari 1992.



digabungkannya atau diintegrasikannya satu atau lebih perseroan dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Dalam hal ini perseroan yang menjadi objek dari Merger adalah perusahaan yang sudah publik (perusahaan yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat) dimana tujuan akhir dari merger tersebut adalah disamping efisiensi secara ekonomi juga meningkatkan sinergi atau performance (kinerja) perusahaan.

Dari segi ekonomi, Merger menimbulkan suatu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari Merger dapat terlihat dari tujuan Merger tersebut diatas. Sedangkan dampak negatif Merger sering berpotensi merugikan pekerja atau karyawan, Direktur dan Komisaris, pemegang saham, serta pihak ketiga dalam hal ini kreditur (masyarakat).

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari Merger perusahaan, baik terhadap pekerja atau karyawan, Direksi dan Komisaris, Kreditur atau masyarakat, pemerintah telah memberi rambu-rambu bahwa perbuatan Merger perusahaan tidak boleh merugikan para pihak dan pihak ketiga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
  - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan
  - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

- (2) Penggabungan. Peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas dan mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, serta adanya keinginan agar Merger Perseroan Terbatas menjadi ideal sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak, maka dalam penulisan ini perlu diadakan pembatasan masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat, kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan Merger.

#### B.PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas tersebut ?
2. Bagaimanakah kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas ?.

### C.KONTRIBUSI PENELITIAN

Tesis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi Teoritis maupun Praktis, yaitu :

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu Hukum, khususnya hukum perusahaan (restrukturisasi perusahaan).

#### 2. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Merger Perseroan Terbatas serta perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam Merger Perseroan Terbatas.
- b. Menjadi masukan untuk bahan pertimbangan bagi pelaku usaha di dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan perusahaan.
- c. Bermanfaat bagi perusahaan yang akan melakukan Merger perusahaan agar Merger perusahaan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak.
- d. Dapat menciptakan model Merger perusahaan yang ideal yang tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak.

### D.KERANGKA TEORITIS

Untuk memberikan arahan terhadap penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu kerangka teori. Kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan, yaitu :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;
5. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini kerangka teori disusun dengan menggunakan metode klasifikasi, yaitu dengan memilih ruang lingkup, pengumpulan istilah-istilah pokok dan kemudian menyusunnya secara sistematis.<sup>7</sup>

Penelitian tesis ini dimulai secara sistematis, dari pembahasan Perseroan Terbatas sebagai wadah kegiatan usaha, restrukturisasi, penggabungan usaha, dampak dari Merger Perseroan Terbatas serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pengertian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal.121

<sup>7</sup> Ibid, hal.129

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>8</sup>.

- Badan Hukum
- Didirikan berdasarkan perjanjian
- Melakukan kegiatan usaha
- Modal dasar
- Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, salah satunya adalah melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas menjalankan kegiatan ekonomi dalam rangka mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatan usaha, seringkali dijumpai suatu Perseroan Terbatas mengalami kesulitan, sehingga perlu adanya usaha penyelamatan terhadap perseroan tersebut agar tetap eksis. Salah satu alternatif untuk menyelamatkan perseroan yang mengalami kesulitan dilakukan dengan jalan restrukturisasi.

Restrukturisasi perusahaan dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, restrukturisasi perusahaan hanya dapat dilakukan dengan cara penggabungan (Merger), Peleburan dan Pengambilalihan.

---

<sup>8</sup>. Abdulkadir Muhammad, opcit, hal.67.

Merger Perseroan Terbatas menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan usaha Bank, adalah Penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan melikuidasi bank-bank lainnya.

Penggabungan (Merger), konsolidasi atau akuisisi perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, mempunyai tujuan dan manfaat antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>.

- a. Meningkatkan *barriers of market entry* bagi calon pesaing yang akan muncul.
- b. Menyingkirkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing itu sebagai sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
- c. Membeli *produk line* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut ada *product lines* atau *services lines* yang ada pada hari ini.
- d. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- e. Memperoleh pasar dan atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- f. Membeli kantor-kantor (*manufacturing, distribution, sales, administrative offices*) dan membeli fasilitas-fasilitas dan perlengkapan lain dari perusahaan yang menjadi sasaran

---

<sup>9</sup>. Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*. Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Hukum Pembinaan Nasional-Departemen Kehakiman RI, Jakarta tgl. 10-11 September 1997

- merger, konsolidasi dan akuisisi untuk meningkatkan kualitas.
- g. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dipunyainya oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
  - h. Memperoleh bisnis lain yang belum dipunyainya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi agar business portfolionya makin beragam.
  - i. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
  - j. Memperkuat kualitas atau keahlian, atau menambah jumlah sumber daya manusia dari perusahaan yang bersangkutan dengan sumberdaya manusia dari perusahaan lain yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
  - k. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*).

Meskipun Merger perusahaan merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka pengembangan dan untuk mengatasi kesulitan perusahaan, namun pada sisi lain Merger perusahaan sering menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat.

#### E.SISTIMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Berisi tentang latar belakang penulisan tesis, permasalahan, kontribusi tesis dan kerangka teori.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka terhadap merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul bagi pihak yang dirugikan dalam perseroan terbatas. Pembahasan pada bab ini terdiri dari Sejarah Merger Perseroan Terbatas, pengertian merger dan tujuan merger, dasar hukum merger, bentuk-bentuk merger, persyaratan merger perseroan terbatas, metode dan tata cara merger perseroan terbatas, akibat hukum Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas.

Bab III. Berisi tentang metodologi penelitian, yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengumpulan data.

Bab IV. Pada bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, serta kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas. Setelah diuraikan hasil penelitian dari permasalahan tersebut diatas, pada bagian pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.



Bab V, Merupakan bagian penutup, pada bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan oleh penulis sebagai penyempurnaan kebijaksanaan dibidang hukum dan ekonomi.

--- Han'S ---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### MERGER PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT YANG TIMBUL BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS

#### A. MERGER PERSEROAN TERBATAS PADA UMUMNYA

##### 1. Sejarah Perkembangan Merger di Indonesia

Sejarah perkembangan Merger mengalami pasang surut, namun demikian pasang surutnya Merger tersebut mempunyai korelasi positif dengan pasang surutnya bisnis di negara yang bersangkutan.<sup>10</sup> Artinya, perkembangan Merger selalu mengikuti keadaan bisnis dan ekonomi suatu negara. Apabila keadaan bisnis dan ekonomi suatu negara lagi *booming* maka mergerpun banyak dilakukan oleh suatu perusahaan, sebaliknya pada saat ekonomi dalam keadaan *resesi* maka kegiatan mergerpun menurun, hal ini adalah wajar, karena Merger dipandang sebagai salah satu upaya untuk memperluas suatu usaha yang tentunya memerlukan "cost" dan modal, apabila prospek bisnis ditempat tersebut tidak baik maka orang enggan mengeluarkan "cost" dan modal tersebut untuk melakukan Merger.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 (UUPT) merupakan tonggak sejarah hukum tentang Merger. Sebab, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebutlah yang memulai mengatur Merger yang cukup *komprehensif*. Sungguhpun sebelumnya ada pengaturan Merger, tetapi hal tersebut baru bersifat *sektoral* dan *level* pengaturannya pun masih di tingkat di bawah Undang-undang. Karenanya, sejarah hukum

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 13

tentang Merger dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, dapat dibagi ke dalam dua periode sebagai berikut:

### 1.1. Periode Pra Undang-Undang Perseroan Terbatas

Di Indonesia, sejarah hukum tentang Merger juga masih terbilang baru. Dalam tingkat Undang-Undang, pengaturan tentang Merger di Indonesia baru dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal ini tidak berarti bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut, Merger tidak pernah dilakukan di Indonesia sebab dalam kenyataannya, praktek Merger di Indonesia sudah dilakukan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Praktek Merger di Indonesia pada dasarnya ada 2 macam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku ke-III yang berlaku terhadap Merger<sup>11</sup> yaitu:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus perjanjian mengenai Merger, jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian mengenai Merger, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku ke-III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang berlaku terhadap semua jenis perjanjian, termasuk perjanjian Merger. Ketentuan umum mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456, yang berisi tentang syarat-syarat suatu perjanjian, kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum dari perjanjian, macam-macam

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal. 20

perjanjian, hapusnya perikatan, berlaku juga untuk perjanjian Merger.

Dalam pelaksanaan Merger suatu perseroan, sering dijumpai jual beli saham Perseroan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu perjanjian jual beli termasuk juga jual beli saham disamping berlaku ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana tersebut diatas, berlaku juga ketentuan khusus mengenai jual beli, yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam perjanjian Merger sering terdapat jual beli maka dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, ditentukan bahwa salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan untuk memperoleh ijin Merger disamping akte perjanjian Merger juga harus dilampirkan akte jual beli saham. Selain teknis pelaksanaan dengan cara jual beli saham perjanjian jual beli saham, perjanjian Merger juga dikenal dengan metode *inbreng* saham. *Inbreng* saham ini dilakukan bersama-sama atau sebagai ganti jual beli saham. Dalam metode *inbreng* saham ini sering dibuat suatu perjanjian *inbreng*.

Sedangkan dalam kegiatan usaha di bidang khusus, yaitu sektor perbankan, selain tunduk kepada ketentuan Merger dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perbankan. Dalam bidang Perbankan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah

dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengatur mengenai Merger dalam bidang Perbankan, yaitu:

- a). Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 614/MK/II/8/1971 mengenai Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank-Bank Swasta Nasional yang melakukan Merger;
- b). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/1989 Tanggal 25 maret 1989 Tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank;
- c). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/15/BPPP tanggal 25 maret 1989 tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Persyaratan dan tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 ini menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/1989.

## 1.2. Periode Pasca Undang-Undang Perseroan Terbatas

Berbeda dengan pengaturan Merger sebelumnya yang hanya bersifat sektoral dan pada tingkat di bawah Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur Merger secara *komprehensif*. Merger pada periode sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dapat dicatat dalam sejarah hukum bisnis sebagai era kepastian hukum bagi tindakan Merger.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.23

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasal-pasal tentang Perseroan Terbatas tidak kita jumpai adanya pengaturan Merger, konsolidasi dan akuisisi yang secara *komprehensif* baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan Merger pada periode ini adalah diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur mengenai *quorum* dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Merger, konsolidasi dan akuisisi.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 menggunakan istilah "*Penggabungan*" untuk Merger, "*Pengambilalihan*" untuk akuisisi dan istilah "*Peleburan*" untuk konsolidasi.

Pengaturan mengenai Merger dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tersebut memang belum cukup lengkap mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan Merger. Pada tanggal 24 Februari 1998 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 ini mengatur penggabungan dan peleburan bagi perusahaan, dimana Perseroan Terbatas yang membubarkan diri itu tidak perlu dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Sebab menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas penggabungan dan peleburan dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur secara lengkap dan rinci mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan Merger, baik yang menyangkut persyaratan, tatacara maupun saat

berlakunya sampai dengan pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.

## 2. Pengertian Merger dan Tujuan Merger

### 2.1. Pengertian Merger

Pengertian penggabungan perusahaan atau lebih dikenal dengan "*Merger*" (untuk selanjutnya disebut Merger) telah menjadi trend bagi suatu perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaan dan memperluas jaringan usahanya, terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang secara cepat dalam waktu relatif singkat. Sebab dengan metode Merger perusahaan, suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan perusahaan dari kecil, tetapi cukup dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang sudah besar atau sedang berkembang.

Istilah Merger berasal dari kata "*Merge*" yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Oleh Karena itu Merger lazim disebut penggabungan dan di lain pihak ada yang menyebutnya sebagai "*fusi*". Dan ada juga yang menyebutnya sebagai "*absorpsi*" (penyerapan). Dalam literatur-literatur, meski istilah Merger perumusannya beragam, namun secara substansi mempunyai kesamaan, yakni penggabungan dua atau lebih perusahaan dan perusahaan yang digabungkan itu harus dibubarkan.

Pengertian Merger dapat kita temukan dalam *Black's law Dictionary*, istilah Merger dimaksudkan adalah sebagai suatu "*Fusi*" atau "*Absorpsi*" dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lain. Secara umum "*Fusi*" atau "*Absorpsi*" tersebut dilakukan oleh suatu subyek yang kurang penting dengan subyek yang lebih

penting, subyek yang kurang penting tersebut kemudian membubarkan diri.<sup>13</sup>

Beberapa ahli hukum dan ekonom Indonesia juga ikut menyumbangkan pendapatnya mengenai pengertian Merger. Seperti misalnya, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, memberikan definisi Merger sebagai berikut : *"Merger adalah penggabungan sedemikian rupa dari dua perusahaan atau lebih (Perseroan Terbatas), sehingga dari segi ekonomi dapat dianggap sebagai suatu kesatuan"*<sup>14</sup>

Pengertian Merger menurut Munir Fuady, SH, MH, LLM, dalam bukunya "Hukum tentang Merger" dijelaskan bahwa dengan istilah Merger ini dimaksudkan sebagai suatu *"fusi"* atau *"absorpsi"* dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya.

Sementara itu A.Zen Umar Purba, mengemukakan bahwa "Merger berarti penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri".<sup>15</sup>

Sedangkan Muchyar Yara, SH, MH dalam bukunya Merger menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengemukakan bahwa istilah *"Merger"* berasal dari kata kerja *"Merge"* yang berarti "menggabungkan" atau menfusikan.

---

<sup>13</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Minnesota, USA West Publishing Co, 1979, hal. 891

<sup>14</sup> Sri Redjeki Hartono, *Penggabungan Perusahaan*, Masalah-Masalah Hukum. Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Nomor 4. 1986. hal.4

<sup>15</sup> A. Zen Umar Purba, *Merger dan Akuisisi dan Kebutuhan Akan Pengaturannya*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Merger dan Akuisisi di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, 14 Desember 1991, hal. 1



Drs. Marcel Go, MS mengartikan bahwa "Merger adalah suatu penggabungan perseroan, dimana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain. Setelah terjadi pengambilalihan tersebut, maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih".<sup>16</sup>

Prof Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam bukunya "Perusahaan Kelompok (*Group Company Concern*) memberikan definisi Merger atau fusi sebagai berikut : Fusi adalah bentuk kerjasama diantara perusahaan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat penuh. Ini berarti bahwa pada perusahaan yang berfusi, kemandirian pihak-pihak yang berfusi tidak lagi ada melainkan perusahaan yang berfusi itu yang satu melebur pada yang lain. Pengertian fusi ditujukan kepada Merger perusahaan-perusahaan, sehingga dari sudut ekonomi mereka merupakan satu kesatuan.<sup>17</sup>

Prof Dr. Rudhi Prasetya, SH. Mengemukakan bahwa yang dinamakan Merger adalah manakala ada dua PT atau lebih yang satu atau lebih menggabungkan diri pada satu PT yang sudah ada tersebut.<sup>18</sup>

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya "*Hukum Perusahaan Indonesia*" mengartikan bahwa Merger Perseroan

---

<sup>16</sup> Marcel Go, *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 76

<sup>17</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Group Company Concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994. hal. 1:

<sup>18</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 58

merupakan pengembangan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada beberapa (minimal dua) perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur ke dalam perusahaan yang masih ada.<sup>19</sup>

Menurut pengertian umum di bidang hukum, Merger berarti sebagai penggabungan (*fusion* atau penyerapan/*absorbsion*) sesuatu hal (atau benda) atau hak lainnya dan pada umumnya terjadi, bilamana salah satu dari padanya mempunyai kedudukan yang lebih lemah atau kurang penting dibandingkan dengan yang lainnya. Biasanya yang lemah ataupun kurang penting akan kehilangan eksistensinya setelah diserap atau setelah bergabung.

Sedangkan pengertian Merger ditinjau dari sudut hukum perusahaan adalah "*The absorption of one company by another, latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and powers of former, and absorbed company ceasing to exist as separate business entity*".<sup>20</sup>

Pengaturan mengenai Merger (menggunakan istilah penggabungan) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, terdapat pada Bab VII tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. walaupun telah menggunakan istilah Penggabungan, namun baik dalam Pasal 1 yang mengatur Ketentuan Umum maupun dalam penjelasan Pasal 102 sampai

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.143-144.

<sup>20</sup> Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 22.

dengan Pasal 109 tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan istilah Penggabungan tersebut. Pengertian Penggabungan baru dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dari Berbagai definisi Merger perusahaan tersebut diatas, terlihat adanya kesamaan di dalam unsur-unsur pengertian Merger perusahaan, yaitu:

- 1). Merger adalah salah satu tindakan hukum penyatuan perusahaan yang melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan, dan satu atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri;
- 2). Dalam Merger, salah satu perusahaan eksistensinya tetap ada dan hidup, sedang yang lainnya lenyap menggabungkan diri dalam perusahaan yang eksis;
- 3). Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima/mengambilalih seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban dan utang perusahaan yang menggabungkan diri.

Yang dimaksud dengan "perusahaan" adalah "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang banyak dipergunakan oleh kalangan usaha di Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muchtar Yara, Op Cit, hal. 14-15

1. Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal yang oleh hukum diberikan status sebagai badan hukum, dan karenanya merupakan "subyek hukum yang mandiri" (*persona stadi in judicio*);
2. Keberadaan Perseroan Terbatas tidak tergantung pada keberadaan pemegang sahamnya, artinya eksistensi Perseroan Terbatas tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pemegang saham;
3. Para pemegang saham Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara terbatas (*limited liability*), artinya pemegang saham tidak ikut bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga;
4. Pemegang saham Perseroan Terbatas memiliki kebebasan untuk mengalihkan saham (saham) kepada pihak lain sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
5. Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang bersifat internasional. Banyak negara lain juga memiliki bentuk perusahaan seperti Perseroan Terbatas ini, meskipun namanya berlainan, seperti misalnya di Inggris dan di negara-negara Anglo Saxon lainnya, dinamakan "*Company Limited by Shares*" atau disingkat "*Co.,Ltd.*", di Jerman, Swiss dan Australia dinamakan, "*Aktiengesellschaft*" atau disingkat '*A.G.*', di Belanda dinamakan "*Naamloze Vennootschap*" atau disingkat "*N.V.*" (nama ini juga pernah digunakan di Indonesia sampai dekade 50an sebelum diubah menjadi 'Perseroan Terbatas');
6. Khusus di Indonesia bentuk Perseroan Terbatas seringkali dijadikan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank atau

untuk mendapatkan kesempatan usaha dari instansi-instansi resmi.

## 2.2. Tujuan Merger

Dalam menghadapi persaingan yang makin lama makin tajam di dunia bisnis, terlebih lagi dalam era globalisasi dewasa ini, perusahaan-perusahaan berupaya mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerjanya sehingga tercipta suatu iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien.

Iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien memungkinkan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku usaha dalam menggerakkan dan mengarahkan kegiatan di bidang ekonomi dapat tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat cepat. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Perseroan Terbatas dalam pengembangan usahanya adalah dengan melakukan Merger.

Tujuan utama suatu Perseroan Terbatas melakukan Merger adalah untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Dengan adanya tambahan sinergi perusahaan yang diperoleh dari Merger tersebut, maka diharapkan dapat menyembuhkan perusahaan yang sedang sakit dalam waktu relatif singkat, sehingga dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan penyembuhan segera, seperti bank misalnya dianjurkan untuk melakukan Merger.

Persaingan yang semakin keras dan semakin tajam di dunia bisnis, terutama dalam memasuki era globalisasi saat ini, perusahaan-perusahaan besar berupaya mencari jalan untuk

meningkatkan efisiensinya dan jika mungkin meningkatkan kinerjanya. Melakukan pengurangan biaya yang tidak sampai mengakibatkan penurunan pendapatan merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh oleh perusahaan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat dan tajam tersebut, cara tradisional seperti tersebut diatas, dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Tetapi cara tradisional tersebut dianggap belum/kurang tepat untuk mengembangkan perusahaan secara lebih cepat. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan mulai mencari alternatif lain, yaitu dengan melakukan Merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan perusahaan).

Merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), atau akuisisi (pengambilalihan perusahaan) ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan *barriers of market entry* bagi calon pesaing yang akan muncul;
- b. Menyingkirkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing sebagai *target company* atau obyek merger, konsolidasi atau akuisisi;
- c. Membeli *product line* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dari perseroan yang akan menerima penggabungan atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada *product lines* atau *service lines* yang telah ada;
- d. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh *target company* atau obyek

- Merger (penggabungan) Perseroan Terbatas, konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan perseroan);
- e. Memperoleh pasar dan atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki oleh target company atau obyek Merger (penggabungan perseroan), konsolidasi (peleburan), atau akuisisi (pengambilalihan perseroan);
  - f. Membeli kantor-kantor (*manufacturing, distribution sales administrativ affice*) dan membeli fasilitas-fasilitas dan perlengkapan lain yang dimiliki *target company* atau obyek Merger (penggabungan Perseroan Terbatas), konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan perseroan);
  - g. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang dimiliki oleh *target company*;
  - h. Memperoleh *bisnis line* yang tidak dimiliki perusahaan yang menerima penggabungan, tetapi dimiliki oleh *target company*, agar *business portfolionya* semakin beragam.
  - i. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik selama ini dipasarkan oleh *target company*;
  - j. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai.

Tujuan-tujuan tersebut di atas dapat dilakukan dalam ruang lingkup nasional, dapat juga dalam ruang lingkup internasional yang lazim disebut *Cross Border Merger* (Merger antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing), misalnya suatu perusahaan Indonesia ingin memperluas daerah pemasaran dan jaringan distribusinya ke luar negeri, maka perusahaan tersebut tidak perlu mendirikan perusahaan baru di negeri yang dituju, akan tetapi cukup dengan cara melakukan Merger (penggabungan Perseroan

Terbatas), baik melalui akuisisi (pengambilalihan) saham maupun melalui akuisisi (pengambilalihan) perusahaan yang telah ada di negara tersebut.<sup>22</sup>

Tambahan sinergi bagi Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, menurut Munir Fuady, berasal dari adanya beberapa keuntungan yang diperoleh dari Merger tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Perkembangan Pasar

Dengan Merger dan akuisisi untuk memperluas pangsa pasar. Dalam hal ini, baik untuk menghasilkan mata rantai produksi yang lengkap maupun untuk memperluas distribusi produk dalam satu area atau memperluas area distribusi;

b. Penghematan Distribusi

Sistem distribusi tunggal, termasuk tetapi tidak terbatas pada salesmen, dealers, retail outlets dan *transportation facilities*, seringkali dapat menangani dua produk yang mempunyai metode distribusi/market yang serupa, dengan menghemat biaya daripada mereka hanya menangani produk tunggal;

c. Diversifikasi

Hal ini dimaksudkan untuk mengelak dari resiko penempatan semua telur ayam dalam satu keranjang, dimana bisa jadi telur ayam akan pecah semua. Karena itu, diadakanlah penganekaragaman jenis usaha, untuk meminimalkan resiko terhadap pasar tertentu dan atau untuk dapat berpartisipasi pada bidang-bidang yang baru tumbuh;

---

<sup>22</sup> P.S. Sudarsaman, *The Essence of Mergers and Acquisition* diterjemahkan oleh Rahmat Herutomo, Penerbit Andi bekerjasama dengan Simon & Schuster (Asia) Pte,Ltd, 1999, hal.5.



d. Keuntungan manufaktur

Banyak keuntungan dapat dipetik dengan menggabungkan dua unit manufaktur atau lebih. Biasanya segi-segi kelemahan dapat diperkuat, *overcapacity* dapat dihilangkan dan *overhead* dapat dikurangi. Dan problem-problem yang bersifat temporer karenanya dapat dipecahkan;

e. Riset and Development (R & D)

Biaya-biaya R&D dapat dikurangi dengan terbukanya kesempatan untuk menggunakan laboratorium bersama, pendidikan bersama dapat dipecahkan.

f. Pertimbangan Finansial

Dalam hal ini untuk meningkatkan *earning per share* dan memperbaiki image di pasar dan mencapai stabilitas dan sekuritas finansial;

g. Pemanfaatan Excess Capital

*Excess capital* masing-masing perusahaan dapat saling dimanfaatkan;

h. Pertimbangan Sumber Daya Manusia

Bagi perusahaan yang kekurangan/mempunyai kelemahan dibidang SDM dapat dibantu oleh perusahaan lain yang SDMnya lebih baik;

i. Kecanggihan dan Otomatisasi

Perkembangan bisnis menuju kepada penggunaan sarana yang semakin canggih dan otomatisasi. Untuk itu diperlukan biaya yang tinggi dan kemampuan SDM yang tangguh. Perusahaan-perusahaan yang kecil akan sulit mengikuti perkembangan ini kecuali dengan membesarkan diri, antara lain dilakukan dengan Merger dan akuisisi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, op.cit, hal 54-55

Dengan melihat keuntungan-keuntungan yang diperoleh apabila suatu Perseroan Terbatas melakukan Merger dengan Perseroan lainnya, selain memperoleh tambahan sinergi, Perseroan Terbatas yang melakukan Merger mempunyai sasaran lain, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Untuk Meningkatkan Konsentrasi Pasar

Apabila perusahaan besar yang melakukan Merger dengan perusahaan sejenis atau dengan perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, maka pasar cenderung lebih terkonsentrasi. Untuk itu, rambu-rambu hukum anti monopoli mesti diwaspadai. Akan tetapi apabila Merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil, menyebabkan perusahaan tersebut menjadi lebih besar, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang memang sudah duluan besar. Hal ini akan mengurangi konsentrasi pasar oleh satu atau lebih perusahaan besar saja.

b. Untuk Meningkatkan Efisiensi

Merger dua atau lebih perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efisiensi dalam produksi atau efisiensi dalam pemasaran, dan penghematan *overhead cost*. Banyak biaya dapat dipotong, atau bahkan banyak tenaga kerja dapat dikeluarkan dalam memproduksi produk yang sama dengan sebelum Merger dilakukan. Akan tetapi, dengan Merger, dimana perusahaan menjadi semakin besar dan pesaing di pasar semakin berkurang, dapat menyebabkan pola persaingan pasar menjadi tidak tajam. Hal ini dapat juga mengarah kepada tidak efisiensinya perusahaan yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal.57-59

c. Untuk Mengembangkan Inovasi Baru

Memang dengan dilakukan Merger, perusahaan menjadi besar sehingga riset dan pengembangan dapat dikembangkan secara canggih. Hal tersebut dapat mendorong untuk timbulnya inovasi baru dalam menghasilkan produk-produk dari perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi apabila perusahaan sudah terlalu besar dan tidak atau kurang persaingannya di pasar, bisa juga menyebabkan perusahaan tersebut akan tetap mempertahankan produk yang sudah ada apa adanya, sehingga mengurangi semangat untuk mendapatkan inovasi baru.

d. Sebagai Alat Investasi

Terutama bagi Merger yang memerlukan pembayaran sejumlah dana merupakan alat untuk investasi bagi perusahaan yang menggabungkan diri tersebut. Apabila perusahaan yang menggabungkan diri tersebut merupakan perusahaan asing atau perusahaan campuran asing, maka investasi tersebut dapat dipandang sebagai suatu investasi asing. Dan jika nanti investasi tersebut dapat kembali (*divestasi*), maka diharapkan akan didapat banyak capital gain dari Merger tersebut.

e. Sebagai Sarana Alih Teknologi

Jika terjadi Merger, perusahaan yang satu dapat menimba pengalaman dan teknologi dari perusahaan yang lain. Dengan demikian Merger dapat merupakan sarana pengalihan teknologi.

f. Untuk Mendapatkan Akses Internasional

Biasanya tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk sampai mendapatkan akses ke pasar internasional. Untuk itu dapat ditempuh dengan Merger dengan suatu perusahaan asing sehingga pasar dari perusahaan asing tersebut dapat diakses.

g. Untuk Meningkatkan Daya Saing

Telah disebutkan bahwa Merger suatu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan melakukan inovasi-inovasi. Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan daya saingnya, misalnya daya saing ekspor maupun impor.

h. Untuk Memaksimalkan Sumber Daya

Dengan Merger, maka sumber daya yang ada di dua atau lebih perusahaan yang bergabung dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, dapat pula dilakukan pengurangan duplikasi dan memaksimalkan penggunaan aktiva yang menganggur, sehingga produksinya dapat didorong secara maksimal.

i. Untuk Menjamin Pasokan Bahan Baku

Khususnya terhadap Merger vertikal, yakni Merger antara perusahaan hulu dengan hilir, maka Merger seperti ini dapat menjamin tersedianya bahan baku karena mempunyai perusahaan pemasok bahan bakunya sendiri.

Sedangkan menurut Joseph Krallinger dalam bukunya "*Merger & Acquisition : Managing The Transaction*" sebagaimana dikutip oleh Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, adalah Merger, konsolidasi dan akuisisi Perseroan Terbatas dilakukan untuk tujuan-tujuan dan manfaat, antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Meningkatkan *barriers of market entry* bagi calon pesaing yang akan muncul;

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman RI, Jakarta, tanggal 10-11 September 1997

- b. Menyingkirkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing itu sebagai sasaran Merger, konsolidasi dan akuisisi;
- c. Membeli *product line* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dari perusahaan yang akan mengambilalih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada *product lines* atau *service lines* yang ada pada saat itu;
- d. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran Merger, konsolidasi dan akuisisi;
- e. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran Merger, konsolidasi dan akuisisi;
- f. Membeli kantor-kantor (*manufacturing, distribution, sales, administrative office*) dan membeli fasilitas dan perlengkapan lain dari perusahaan yang menjadi sasaran Merger, konsolidasi dan akuisisi untuk meningkatkan kapasitas;
- g. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dipunyai oleh perusahaan yang menjadi sasaran Merger, konsolidasi dan akuisisi;
- h. Memperoleh bisnis yang belum dipunyai namun dipunyai oleh perusahaan yang sasaran Merger, konsolidasi dan akuisisi;
- i. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi sasaran Merger, konsolidasi dan akuisisi;
- j. Memperkuat kualitas dan keahlian atau menambah jumlah sumber daya manusia dari perusahaan yang bersangkutan dengan sumber daya manusia dari perusahaan lain yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi;

- k. Melakukan investasi atas keuangan yang berlebihan dan tidak dipakai (*idle*).

Sementara itu A. Zen Umar Purba berpendapat bahwa tujuan Merger Perseroan Terbatas adalah untuk:<sup>26</sup>

- a. Memperbaiki manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan *profitability* yang bergabung;
- b. Menghambat persaingan, yaitu jumlah perseroan yang bersaing berkurang sehingga kebijaksanaan dipegang oleh suatu kelompok tertentu yaitu perseroan yang mengambilalih;
- c. Mempertahankan kesinambungan usaha;
- d. Memperbesar bagian pangsa pasar sekelompok perseroan;
- e. Memperkuat sumber pemasukan barang.

### 3. Dasar Hukum Merger

#### 3.1. Dasar Hukum Utama

Secara yuridis, yang merupakan dasar hukum bagi tindakan Merger adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum Utama (UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- b. Dasar Hukum Merger di bidang Kontraktual (Buku III KUH Perdata)
- c. Dasar Hukum Merger Sehubungan Dengan Status Perusahaan (UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing)

---

<sup>26</sup> A. Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Bisnis*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XXV, Nomor 1, Februari 1995, FH-UI, Jakarta, hal. 9

- d. Dasar Hukum konsekuensi Merger (UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
- e. Dasar Hukum Pembidangan Usaha (UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank).<sup>27</sup>

Dari beberapa dasar hukum tersebut, penulis membatasi diri untuk memfokuskan pada uraian mengenai Merger Perseroan Terbatas berdasarkan:

1. Ketentuan Hukum Perseroan (UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas);
2. Ketentuan Hukum Perbankan (UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta PP No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank);
3. Ketentuan Hukum Pasar Modal (UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya).

### 3.2. Berdasarkan Ketentuan Hukum Perbankan

Merger usaha di bidang Perbankan diatur dalam ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, terdapat satu

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.63

Pasal yang mengatur mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, yaitu Pasal 28.

Dalam Pasal 28 tersebut ditentukan sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai Merger, konsolidasi dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>28</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Ayat (1) bahwa dalam melakukan Merger, konsolidasi dan akuisisi wajib dihindarkan timbulnya pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula Merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.<sup>29</sup>

Sedangkan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan yang berkaitan dengan Merger sebagai pelaksanaan dari Pasal tersebut, adalah:

- a. PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
- b. SK. Direksi Bank Indonesia No.321/15/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum;

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 28

<sup>29</sup> Ibid, penjelasan Ayat (1)



- c. SK. Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.<sup>30</sup>

Menurut PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, menentukan bahwa:

## Pasal 2

Merger dan konsolidasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan:

- (1). Pemegang saham bank yang melakukan Merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil Merger atau bank hasil konsolidasi;
- (2). Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi.<sup>31</sup>

Tata Cara Merger Bank menurut PP No.28 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

### a. Inisiatif Untuk Melakukan Merger Bank

Inisiatif untuk melakukan suatu Merger Bank berasal dari beberapa pihak, sebagai berikut:

- (1) Atas inisiatif bank yang akan melakukan Merger tersebut.
- (2) Atas permintaan Bank Indonesia
- (3) Atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus ini adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dari Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.69

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 2

Dewasa ini badan tersebut sudah terbentuk, yaitu Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Selanjutnya tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan Merger masing-masing atas inisiatif ketiga badan tersebut diatas, dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dari Tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank Umum.<sup>32</sup>

#### b. Izin Merger Bank

Izin untuk melakukan Merger Bank (dan juga konsolidasi dan akuisisi) mesti diperoleh dari Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian Bank Indonesia sebagaimana dianut oleh Undang-undang Bank Indonesia No.32 Tahun 1999. Sebelumnya izin Merger bank harus diajukan kepada Menteri Keuangan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat dimintakan izin Merger kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- i. Persetujuan Merger dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing perusahaan yang akan dimerger;
- ii. Pada saat terjadinya Merger, maka jumlah aktiva bank hasil Merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia;
- iii. Bank hasil Merger harus memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- iv. Direksi dan Komisaris dari bank hasil Merger tidak boleh masuk ke dalam daftar orang tercela (harus lulus fit and proper test).

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.69-70

Izin Merger diajukan kepada Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan merger dan satu tembusan dari permohonan izin Merger tersebut dengan pengajuan izin Merger diajukan pula permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil Merger kepada Menteri Kehakiman. Bersamaan dengan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil Merger dilampirkan pula:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
2. Akta Merger.<sup>33</sup>

Di samping itu permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia juga dengan melampirkan:

3. Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
4. Akta Merger.<sup>34</sup>

b. Rancangan Merger Bank

Dalam proses pelaksanaan Merger ada satu dokumen yang disebut dengan Rancangan Merger. Rancangan Merger bersama-sama dengan konsep akta Merger wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perusahaan. Selanjutnya, konsep akta merger yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan ke dalam Akta Merger yang harus dibuat di dengan Notaris dan dengan memakai bahasa Indonesia. Akta merger tersebut berisikan pokok-pokok sebagaimana terdapat dalam dokumen yang disebut Rancangan Merger itu.

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.70-71

<sup>34</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.71

Rancangan Merger di samping berisikan hal-hal sebagaimana terdapat dalam usulan rencana Merger, berisikan pula penegasan dari bank yang akan menerima Merger mengenai penerimaan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.

Sementara usulan rencana Merger yang isinya juga dimuat dalam Rancangan Merger berisikan hal-hal seperti yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (2) PP No.28 Tahun 1999.<sup>35</sup>

c. Pembubaran Bank Karena Merger

Berbeda dengan Merger pada umumnya yang menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 masih dimungkinkan dilakukan melalui likuidasi, maka suatu Merger Bank menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini hanya mungkin dilakukan tanpa likuidasi. Konsekuensinya seluruh aktiva dan pasiva dari Bank yang akan bubar karena Merger beralih karena hukum kepada bank yang eksis setelah Merger. Dengan demikian, jika akhirnya ada bank yang dibubarkan setelah Merger, maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan secara administratif belaka, tanpa diikuti dengan tindakan likuidasi.

Jika tidak ada tindakan pemberesan terhadap asset-assetnya. Telah dijelaskan bahwa Merger bank ada yang dilakukan dengan mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu merger dianggap bubar sejak tanggal persetujuan dari

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, Op Cit, Hal. 71

Menteri Kehakiman. Di samping itu pula yang dilakukan dengan hanya pelaporan kepada Menteri Kehakiman.

Pengaturan tentang kapan saat bubarnya perusahaan juga berbeda, yakni digantungkan kepada sistem mana yang dipilih. Jika yang dipilih adalah sistem dengan mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu Merger dianggap bubar sejak tanggal Persetujuan dari Menteri Kehakiman. Akan tetapi manakala yang dipilih adalah system dimana perubahan anggaran dasar dengan hanya memberi pelaporan saja kepada Menteri Kehakiman, maka bubarnya bank yang melakukan Merger terhitung sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar di dalam daftar perusahaan.<sup>36</sup>

#### d. Pengumuman tentang Merger

Untuk memenuhi unsur transparansi dari suatu Merger, maka ketentuan perundang-undangan mengharuskan agar dilakukan berbagai pengumuman, khususnya bagi suatu Merger Bank maka Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 mengharuskan adanya pengumuman sebagai berikut:

- i. Pengumuman dalam Dua Surat Kabar Harian
- ii. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan
- iii. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara
- iv. Pemberitahuan Secara Tertulis
- v. Pengumuman Secara Lain.

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.72

#### e. Keberatan Atas Merger

Siapa saja dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Merger asal ada alasan yang sah secara hukum. Akan tetapi selain keberatan umum tersebut, ada beberapa golongan yang mendapatkan perlakuan khusus secara yuridis, jika ingin mengajukan keberatan-keberatan terhadap Merger tersebut yaitu sebagai berikut:

- i. Pihak Pemegang saham Minoritas
- ii. Pihak Kreditor
- iii. Pihak Karyawan
- iv. Pihak tersaing secara tidak sehat.<sup>37</sup>

Akan tetapi, di dalam PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37, perlakuan khusus hanya diberikan kepada pihak kreditor dan pemegang saham minoritas saja. Dalam hal ini pihak kreditor dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas rencana Merger yang telah dituangkan dalam suatu Rancangan Merger. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal ini keberatan tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, guna memperoleh persetujuannya.<sup>38</sup>

### 3.3. Berdasarkan ketentuan Hukum Perseroan

Merger diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.72-73

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, Pasal 37

1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai Merger, Akuisisi dan Konsolidasi mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 mengenai quorum dan voting dalam RUPS untuk Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.

Pengaturan Merger di dalam Pasal-pasal 102-109 Undang-undang No.1 Tahun 1995, memang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Merger. Dalam pasal-pasal tersebut baru mengatur hal-hal yang pokok saja, yang antara lain mengenai batasan pengertian Merger, rencana dan rancangan Merger, syarat-syarat Merger serta persetujuan RUPS atas rencana Merger. Beberapa ketentuan tersebut, dicantumkan di dalam Pasal 102, yang menentukan bahwa satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada. Rencana Merger dituangkan dalam rancangan Merger yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan Merger yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama perseroan yang akan melakukan Merger;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan Merger atau Peleburan dan Persyaratan Merger;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap saham perseroan hasil Merger;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar hasil Merger apabila ada;

- e. Neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan Merger; dan
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Merger Perseroan Terbatas tersebut hanya dapat dilakukan apabila rancangan Merger disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Di samping beberapa persyaratan tersebut, Merger harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 yang menentukan, bahwa perbuatan hukum Merger perseroan harus memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Jika terdapat pemegang saham minoritas yang menolak rencana Merger, maka perseroan harus memberikan hak pemegang saham minoritas tersebut untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.<sup>39</sup>

Rancangan Merger tersebut, menurut ketentuan Pasal 105 harus mendapat persetujuan dari RUPS. Keputusan RUPS mengenai Merger perseroan sah, apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76.

---

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 104



Rancangan Merger perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS tersebut dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Apabila rancangan Merger perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS tersebut disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Maka akta perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, juga diatur mengenai akibat hukum yang timbul dari Merger. Dalam Pasal 107 tersebut ditentukan, bahwa dalam hal terjadi Merger maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pembubaran perseroan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Apabila pembubaran perseroan tidak didahului oleh likuidasi maka:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan

---

<sup>40</sup> Ibid, Pasal 106

- b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil Merger atau peleburan.<sup>41</sup>

Setelah proses Merger selesai dilaksanakan, maka Direksi perseroan hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger atau peleburan tersebut dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Merger selesai dilakukan.<sup>42</sup>

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara Merger lebih detail dan lengkap menurut Pasal 109 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 24 Februari 1998 telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 yang menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut hanya khusus mengatur Merger, akuisisi dan konsolidasi bagi perusahaan dimana Merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak dilakukan tindakan likuidasi terlebih dahulu. Sebab menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Merger, konsolidasi dan akuisisi dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi.<sup>43</sup>

Syarat-syarat dari Merger, akuisisi dan konsolidasi dari perusahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tersebut pada prinsipnya sama seperti yang terdapat dalam Bab II Peraturan

---

<sup>41</sup> Ibid, hal.107

<sup>42</sup> Ibid, Pasal 108

<sup>43</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.67

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi:

#### Pasal 4

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Kepentingan perseroan pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
  - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Merger, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar sahamnya yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

#### Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.

#### Pasal 6

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (3) Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak tercapai

maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal ini pihak kreditur dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas rencana Merger yang telah dituangkan dalam suatu rancangan Merger. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberatan-keberatan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu relatif singkat, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini keberatan tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Umum pemegang Saham guna mendapat penyelesaiannya.<sup>44</sup>

### 3.4. Berdasarkan Ketentuan Hukum Pasar Modal

Jika salah satu atau lebih perseroan baik Bank maupun non Bank yang melakukan Merger tersebut merupakan perseroan terbuka, maka pelaksanaan Merger harus didasarkan tersebut merupakan perseroan terbuka, maka pelaksanaan Merger harus didasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang harus diikuti sebagai dasar hukum tersebut, adalah yang berkaitan dengan hal-hal:

#### a. Prosedur.

Jika salah satu atau lebih perseroan yang terlibat Merger adalah perseroan terbuka, maka harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di bidang pasar modal, disamping juga harus

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.73

tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya. Karena, untuk Merger perseroan terbuka banyak instansi yang terlibat, mulai dari Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, BAPEPAM dan atau Bank Indonesia.

Di antara prosedur khusus yang harus dipenuhi oleh perusahaan Merger di mana salah satu atau lebih di antaranya adalah perusahaan terbuka adalah jika terjadi pengeluaran biasa lewat *right issue*. Apabila salah satu atau lebih di antara perseroan yang akan Merger tersebut adalah perseroan terbuka maka perseroan yang harus tetap hidup (*surviving company*) sebaiknya perseroan terbuka. Jika tidak demikian, maka harus dilakukan juga proses *going private*.<sup>45</sup>

#### b. Kebutuhan Informasi

Pada perusahaan terbuka, keterbukaan informasi merupakan masalah yang sangat penting dan merupakan faktor yang sangat dominan dalam pengaturan hukum mengenai pasar modal. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam hal, suatu Perseroan Terbuka dalam bentuk bank ketika melakukan tindakan Merger.

Tindakan-tindakan yang bermuara kepada keterbukaan banyak dilakukan dalam Merger bank ini, yaitu sebagai berikut:

- i. Merger harus disetujui oleh RUPS (ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal);

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.76

- ii. Pengumuman mengenai akan dilakukan RUPS harus dilakukan melalui dua surat kabar (ketentuan dalam bidang pasar modal);
- iii. Pemanggilan RUPS harus dilakukan melalui dua surat kabar (ketentuan di bidang pasar Modal);
- iv. Rencana Merger wajib diumumkan dalam dua surat kabar paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (ketentuan dalam UU PT);
- v. Direksi hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam dua surat kabar, paling lambat 30 hari setelah Merger selesai dilakukan (ketentuan dalam UU PT);
- vi. Karena tindakan Merger termasuk informasi atau tindakan material menurut Pasal 1 Ayat (7) dari Undang-Undang Pasar Modal, maka ada kewajiban bagi emiten, yaitu paling lambat hari kerja setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau faktor material:
  - a. melaporkan kepada BAPEPAM; dan
  - b. mengumumkan kepada masyarakat.<sup>46</sup>

Aspek lain yang mesti diperhatikan dalam rangka melakukan Merger bank adalah aspek saham dan jual beli saham di pasar sekunder. Banyak yang harus dilakukan dalam hubungan dengan saham itu sendiri. Misalnya melakukan penukaran saham dengan saham dari perusahaan yang masih eksis, pemusnahan saham lama, dan lain-lain masalah teknis yang berlaku di Bursa Efek di mana saham tersebut diperdagangkan.

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.77

Banyak ketentuan di bidang pasar modal yang bermuara ke arah perlindungan pemegang saham minoritas/publik. Beberapa di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keharusan keterbukaan;
- b. Keharusan pemberlakuan asas *super majority* untuk RUPS yang menyetujui Merger (menurut UU PT);
- c. Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang layak (menurut UU PT);
- d. RUPS pemegang saham independen jika terjadi benturan kepentingan, misalnya terhadap Merger dalam satu group perusahaan (ketentuan di bidang pasar modal);
- e. Jika dengan Merger terjadi penyertaan oleh perusahaan terbuka, maka saham dan asset perusahaan target harus diaudit dan dinilai secara profesional oleh penilai independen (ketentuan di bidang pasar modal); dan
- f. Tindakan Merger harus diumumkan kepada publik (ketentuan dalam UU PT).<sup>47</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Merger

Apabila ditinjau dari bentuknya, Merger dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu Merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, Merger berdasarkan status hukumnya, dan Merger berdasarkan sikap direksi dari perusahaan yang akan digabungkan.

##### 4.1. Bentuk-bentuk Merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat.

Bentuk Merger dalam kelompok ini, dibagi atas:

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal. 77-78

## 1. Merger Horizontal

Yang dimaksud Merger Horizontal adalah Merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai jenis dan tingkat kegiatan usaha yang sama, dan sebelumnya justru saling bersaing di dalam memproduksi barang/jasa yang sama, atau menjual/memasarkan barang atau jasa yang sama dalam suatu wilayah pemasaran.<sup>48</sup>

Contoh dari Merger horizontal adalah antara lain Merger antara Bank Abadi Jaya yang bergabung ke dalam Panin Bank, atau American Motors yang bergabung ke dalam Chrysler pada tahun 1987.<sup>49</sup>

Sedangkan Merger Horizontal menurut Munir Fuady, SH,MH,LLM. Bahwa Merger horizontal merupakan Merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis (*line of business*) yang sama. Contoh dari Merger horizontal ini dapat disebutkan yaitu Merger antara Gulf Oil dengan Churon Corporation di tahun 1984.

Merger horizontal ini khusus jika dilakukan dalam satu kelompok usaha ada dua perusahaan dalam satu kelompok yang disebut dengan *sister company*. Saham-saham mereka sama-sama dipegang oleh satu perusahaan holding. Tetapi kemudian setelah Merger horizontal, maka perusahaan holding memegang saham anak perusahaan hasil Merger yang telah bersatu. Dan dalam proses Merger horizontal ini

---

<sup>48</sup> Henry Campbell Black, Blacks Law Dictionery, Fifth Edition (St. Paul Minnesota : West Publishing Co. 1979), hal.72

<sup>49</sup> Muchyar Yara, Op Cit, hal.29-30



khususnya jika dipilih Merger tanpa mengadakan likuidasi maka tindakan-tindakan yuridis minimal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- i. Semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu kepada anak perusahaan yang lain, kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju Merger;
- ii. Anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya, kemudian dibubarkan tanpa likuidasi.
- iii. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju Merger dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau minta kompensasi harga yang dimilikinya tanpa menjadi pemegang saham pada anak perusahaan hasil Merger.<sup>50</sup>

## 2. Merger Vertikal

Merger vertikal adalah Merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang/jenis usaha yang sejenis, tetapi berbeda dalam tingkat operasinya. Misalnya Merger antara perusahaan distributor mobil dengan perusahaan agen penjualan mobil.

Merger vertical menurut *Black's Law Dictionary*, bahwa Merger sebagai "*merger between two firm that have a buyer-seller relationship, that is one produce a produce a product that is then sold to the seller*".<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.06

<sup>51</sup> Henry Campbell Black, Lock Cit, hal 1401

Merger vertikal dilatarbelakangi tujuan untuk menjalin pengadaan dan berkesinambungan atas bahan baku yang dibutuhkan bagi kegiatan produksi atau menjamin jalur pemasaran atas barang dan jasa atau juga untuk menekan biaya produksi dan pemasaran.

Munir Fuady, SH,MH,LLM; menjelaskan bahwa Merger vertikal adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Jadi hubungan bisnis merupakan hubungan produksi dan supplier atau hubungan dari hulu ke hilir, contoh Merger antara Du Pont dengan perusahaan minyak bumi Conoco, karena Du Pont membutuhkan minyak bumi untuk proses kimianya.<sup>52</sup>

### 3. Merger Konglomerat

Merger konglomerat adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai hubungan, baik dalam arti horizontal (jenis usaha dan tingkat operasi kegiatan yang sama) maupun dalam arti vertikal (jenis usaha yang sama tetapi berbeda dalam tingkat operasi kegiatan).<sup>53</sup>

Contoh Merger konglomerat ini adalah Merger perusahaan antar Vicks Richardson, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi obat-obatan yang kemudian menggabungkan diri ke dalam Procter & Gamble sebuah perusahaan yang

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal. 88-89

<sup>53</sup> Henry Campbell Balck, Lock Cit, hal. 892

bergerak di bidang produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga.

Apabila ditinjau dari sudut tujuan (motif ekonomi) dari perusahaan penerima Merger (*absorbing company*), maka Merger konglomerat ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut:

- (a). *Geographic Market Extention Merger*, yaitu Merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai kaitan satu dengan lainnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal, tetapi masing-masing perusahaan memiliki/menguasai jaringan (*network*) pemasaran di daerah-daerah pemasaran (*market area*) yang berbeda.

Tujuan Merger disini adalah untuk memperluas jaringan pemasaran perusahaan yang menerima Merger dengan memanfaatkan jaringan pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan yang digabungkan.

- (b). *Product Extention Merger*, yaitu Merger konglomerat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal, tetapi masing-masing perusahaan bergerak di bidang produksi barang/jasa yang berbeda.

Tujuan Merger adalah untuk perluasan bidang usaha perusahaan penerima Merger dengan cara mengambilalih

kegiatan produksi barang/jasa dari perusahaan yang digabungkan. Merger antara Procter & Gamble dan Vick Richardson tersebut di atas, merupakan contoh yang tepat untuk Merger bentuk ini.

(c). *Pure Conglomerat Merger*, yaitu Merger yang dilahirkan oleh perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan dilaksanakan semata-mata untuk tujuan perluasan usaha perusahaan penerima Merger, tanpa memperhatikan hal-hal khusus (seperti keistimewaan, jaringan pemasaran atau produksi) yang melekat pada perusahaan yang digabungkan.<sup>54</sup>

#### 4.2. Bentuk-Bentuk Merger berdasarkan status hukumnya.

Merger dalam bentuk ini dapat dibedakan atas:

##### 1. *Statutory Merger*

Adalah Merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan secara sah dan tuntas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maupun berdasarkan perjanjian Merger yang dibuat oleh para pihak. Di sini salah satu perusahaan (perusahaan penerima Merger) tetap hidup dan melanjutkan aktivitasnya serta secara otomatis berhak atas segala harta (*assets*), kewajiban dan utang (*liabilities*) dari perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*absorbed company*). Perusahaan-perusahaan yang digabungkan

---

<sup>54</sup> Muchyar Yara, Op Cit, hal.31-32

tersebut menjadi hilang atau lenyap status dan identitasnya sebagai perusahaan.

## 2. De Facto Mergers

Adalah Merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan tanpa didukung oleh peraturan hukum yang berlaku di tempat perusahaan-perusahaan yang terlibat Merger tersebut berdomisili. Meskipun perusahaan penerima Merger telah menguasai sebagian terbesar dari harta, hak-hak serta tanggungjawab atas kewajiban dan utang-utang dari perusahaan yang digabungkan, namun yang terakhir ini secara hukum tetap dianggap masih hidup dan mempunyai kedudukan yang penuh sebagai perusahaan yang mandiri.<sup>55</sup>

### 4.3. Bentuk-Bentuk Merger berdasarkan sikap direksi dari perusahaan yang akan digabungkan.

Merger jenis ini dapat dibagi atas:

#### 1. *Agreed Merger*

Direksi perusahaan yang akan digabungkan sejak awal menyetujui dilakukannya Merger bahkan adakalanya, justru Direksi perusahaan yang akan digabungkan inilah yang mengusulkan dan mendorong agar perusahaan yang akan menerima Merger tertarik untuk melakukan Merger.

#### 2. *Unopposed Merger*

Direksi perusahaan yang akan digabungkan tidak menolak rencana Merger perusahaan, tetapi juga tidak berinisiatif

---

<sup>55</sup> Muchyar Yara, Op Cit, hal.33-34

mendorong perusahaan yang akan menerima Merger untuk melakukan Merger.

### *3. Defended Merger*

Sejak awal Direksi perusahaan yang akan digabungkan menolak rencana Merger bahkan kadangkala aktif melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya Merger. Sikap direksi tersebut di atas dapat berarti ganda, yaitu mereka sungguh-sungguh menolak pelaksanaan Merger atau hanya sebagai taktik untuk menaikkan harga saham dari perusahaan yang akan menerima Merger.

### *4. Competitiv Merger*

Direksi perusahaan yang akan digabungkan menghadapi lebih dari satu tawaran untuk melakukan Merger dari dua atau lebih perusahaan yang akan menerima Merger, sehingga Direksi mempunyai kemampuan untuk pilihan yang paling menguntungkan.<sup>56</sup>

### *5. Persyaratan Merger Perseroan Terbatas*

Perbuatan hukum Merger perusahaan dilakukan oleh dua pihak pengusaha yang secara hukum mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari yang lainnya. Mengingat perbuatan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar, maka hal tersebut akan berdampak pada status karyawan, kreditur bahkan masyarakat luas.

---

<sup>56</sup> Muchyar Yara, Op Cit, hal.34-35

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka akibat hukum atau dampak yang timbul adalah akibat hukum atau dampak yang positif, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

#### 5.1. Syarat Formil

a. Perseroan yang akan menggabungkan diri dan perseroan yang akan menerima Merger harus membuat usulan rencana Merger yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan Merger;
- (2) Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
- (3) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap saham perseroan hasil Merger;
- (4) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil Merger;
- (5) Neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan Merger; dan
- (6) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, anantara lain meliputi:

a. Neraca proforma perseroan hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari

- Merger, berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- b. Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
  - c. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
  - d. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
  - e. Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil Merger;
  - f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Mrger;
  - g. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
  - h. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
  - i. Rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
  - j. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
  - k. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.<sup>57</sup>
- (7) Neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil Merger, dalam hal perseroan yang melakukan Merger tergantung dalam satu group atau antar group.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 7

<sup>58</sup> Ibid, Pasal 8



- (8) Persetujuan atas usulan rencana Merger dari komisaris masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan.<sup>59</sup>
- b. Rancangan Merger yang dibuat bersama oleh Direksi perseroan yang melakukan Merger, yang memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger yang telah disetujui oleh Komisaris dari masing-masing perseroan yang melakukan Merger.<sup>60</sup>
  - c. Pernyataan yang berisi penegasan dari perseroan yang akan menerima Merger mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.<sup>61</sup>
  - d. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rincian Merger.<sup>62</sup>
  - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan Merger beserta konsep akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Merger.<sup>63</sup>

## 5.2. Syarat Materiil

Selain harus memenuhi persyaratan formil tersebut, Merger usaha juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Ibid, Pasal 7

<sup>60</sup> Ibid, Pasal 9-10

<sup>61</sup> Ibid, Pasal 11

<sup>62</sup> Ibid, Pasal 12

<sup>63</sup> Ibid, Pasal 13

- a. Penggabungan usaha hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- b. Penggabungan usaha tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas atau pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum pemegang Saham mengenai penggabungan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>64</sup>
- c. Penggabungan usaha harus memperhatikan kepentingan kreditur.<sup>65</sup>
- d. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- e. Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dicapai, maka ketentuan mengenai quorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid, Pasal 4

<sup>65</sup> Ibid, Pasal 6 Ayat (2)

<sup>66</sup> Ibid, Pasal 6 Ayat (3)

- f. Penggabungan usaha tidak boleh menciptakan persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta penggabungan usaha juga tidak boleh menimbulkan monopoli dan monopsoni dalam segala bentuk yang merugikan masyarakat.<sup>67</sup>

## 6. Metode dan Tatacara Merger Perseroan Terbatas

Metode atau tata cara pelaksanaan Merger usaha juga mengalami perkembangan yang berarti yaitu dari yang bersifat sederhana sampai dengan yang sangat kompleks. Perkembangan ini dipengaruhi tidak hanya oleh hal-hal yang bersifat ekonomis, tetapi juga oleh perkembangan hukum dan politik dari suatu negara.

Berikut ini akan diuraikan mengenai metode Merger usaha sebagai berikut:<sup>68</sup>

### 1. Metode *Statutory* Merger

Merger usaha dilakukan setelah disepakatinya perjanjian Merger oleh perseroan yang menggabungkan diri (*absorbed company*) dengan perseroan penerima penggabungan (*absorbing company*). Ketika Merger efektif, maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi hilang eksistensinya dan perseroan penerima Merger yang terus beroperasi termasuk menjalankan kegiatan usaha perseroan yang menggabungkan diri sebelumnya. Sebagai akibat perseroan penerima Merger

---

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan Umum, alinea 2.

<sup>68</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, L. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1987, hal. 428-432

hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari perseroan yang menggabungkan diri.

Kemudian pemegang saham pada perusahaan yang menggabungkan diri tersebut menerima kompensasi untuk menjadi pemegang saham pada perseroan penerima Merger. Apabila perseroan tersebut tidak mau menerima kompensasi maka mereka berhak menerima uang tunai yang setara dengan nilai saham yang dimilikinya pada perseroan yang menggabungkan diri (*Appraisal Right*).

## 2. Metode *Cash Merger*

Metode ini dapat dilaksanakan apabila para pemegang saham di perseroan penerima Merger tidak mau menerima seluruh pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri, sehingga seluruh saham tersebut dikompensasi berupa uang tunai. Metode ini merupakan pengembangan dari *Statutory Merger*, di mana pemegang saham pada perseroan penerima Merger tidak menghendaki adanya peralihan saham.

## 3. Metode *Triangular Merger*

Merger usaha ini dimulai oleh perseroan yang akan menerima Merger dengan terlebih dahulu membentuk sebuah perseroan baru sebagai anak perusahaan. Selanjutnya anak perusahaan tersebut kemudian akan bertindak sebagai penerima Merger dengan perseroan yang akan menggabungkan diri (*absorbed company*). Pemegang saham pada perseroan yang menggabungkan diri selanjutnya diberi kompensasi berupa uang tunai atau dalam bentuk saham pada perusahaan induk.

Dengan demikian maksud dan tujuan Merger usaha dengan metode ini adalah agar tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban perseroan yang menggabungkan diri (*absorbed company*) dapat beralih kepada anak perusahaan yang menerima Merger (*absorbing company*) dan para pemegang saham perseroan yang merupakan perusahaan induk dapat terbebas dari kewajiban-kewajiban tersebut.

#### 4. Metode *Reverse Triangular Merger*

Metode Merger usaha ini merupakan kebalikan dari metode triangular Merger, di mana perseroan yang akan menggabungkan diri membentuk anak perusahaan yang akan berfungsi sebagai perseroan yang menggabungkan diri (*absorbed company*). Sementara itu, perusahaan induk dari target company dapat menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai dari perseroan penerima Merger (*absorbing company*) atau dalam bentuk saham pada perseroan penerima Merger (*absorbing company*).

Metode ini dilaksanakan dalam hal perseroan yang menggabungkan diri memiliki beberapa jenis kegiatan usaha yang berbeda, seperti misalnya perdagangan, industri, konstruksi dan sebagainya. Sedangkan perseroan penerima Merger (*absorbing company*) hanya berminat untuk menggabungkan satu atau beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh perseroan yang akan menggabungkan diri (*absorbed company*) tersebut, misalnya usaha percetakan dan industrinya saja.

Untuk itu perseroan yang akan menggabungkan diri mendirikan perseroan baru yang seluruh pemegang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama (sehingga perseroan baru tersebut berstatus sebagai anak perusahaan), untuk mengalihkan jenis usaha percetakan dan industri berikut seluruh assetnya (hak dan kewajiban) yang berkaitan dengan usaha percetakan dan industri kepada perusahaan tersebut.

Setelah proses pendirian anak perusahaan selesai, baru dilaksanakan proses Merger, di mana kemudian anak perusahaan tersebut berfungsi sebagai perseroan yang akan menggabungkan diri (*absorbed company*) ke dalam perseroan penerima Merger (*absorbing company*).

Setelah selesai proses Merger tersebut, anak perusahaan yang menggabungkan diri (*absorbed company*) dibubarkan dan perusahaan induk dari *absorbed company* memperoleh kompensasi dalam bentuk saham pada *absorbing company* atau bentuk uang tunai.

#### 5. Metode *Short Form* Merger

Metode ini dilaksanakan dalam hal Merger Perseroan Terbatas dilakukan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya atau sebagian. Metode *Short Form Merger* ini terbagi atas dua jenis yaitu *Up Stream Merger* (dalam hal perusahaan induk bertindak selaku *absorbing company*) dan *Down Stream Merger* (dalam hal anak perusahaan yang bertindak selaku *absorbing company* dan perusahaan induk selaku *absorbed company*).

## 6. Metode *Merger* Menurut Prinsip Akuntansi

*Metode ini tidak berkaitan dengan pendekatan dari unsur hukum, melainkan semata-mata didasarkan atas makna Merger secara ekonomis. Menurut prinsip-prinsip akuntansi, maka metode ini dibedakan atas dua jenis, yaitu:*<sup>69</sup>

### a. *Pooling of Interest Method*

Metode ini dapat juga disebut metode penyatuan kepentingan. Metode ini dipergunakan, jika Merger usaha merupakan tindakan untuk menyatukan kepemilikan dari dua atau lebih perseroan yang digabungkan. Artinya di sini, sejak semula *absorbed company*, dianggap telah bergabung ke dalam *absorbing company*, sehingga harta/aktiva target company yang dialihkan kepada *absorbing company* dinilai sesuai dengan harga buku yang terakhir tercatat di dalam pembukuan *absorbed company*.

### b. *Purchase Method*

Metode ini juga disebut metode pembelian. Metode ini dipergunakan jika Merger Perseroan Terbatas menimbulkan perubahan pada struktur nilai pemilikan atas harta/aktiva pada perusahaan penerima Merger. Harta/aktiva dinilai berdasarkan harga yang riil dan wajar (harga pasar/*market absorbed company* yang dialihkan kepada *absorbing company value*) dan bukan berdasarkan pada harga buku (*book value*).

---

<sup>69</sup> Mar'ie Muhammad, *Aspek Perpajakan dalam Praktek Business Combination*, makalah disampaikan dalam Seminar Tentang Business Combination, Jakarta 1991, hal.5

## B. AKIBAT HUKUM MERGER PERSEROAN TERBATAS

Merger Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu dapat menimbulkan akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, karyawan, kreditur dan masyarakat, bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.

### 1. Keuntungan dan Kerugian Merger Perseroan Terbatas

Merger Perseroan Terbatas dilandasi oleh adanya motivasi untuk meningkatkan sinergi perusahaan yang diharapkan membawa keuntungan ekonomis, baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya maupun bagi perekonomian secara makro, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat merugikan perekonomian nasional yang akan diuraikan di bawah ini.<sup>70</sup>

#### 1.1. Keuntungan Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Merger Perseroan Terbatas.

Keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam Merger Perseroan Terbatas, agar lebih jelas dipisah menjadi 2 (dua), yaitu keuntungan bagi perusahaan penerima Merger dan keuntungan bagi perusahaan yang menggabungkan diri.

Keuntungan bagi perusahaan penerima Merger, adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan harta perusahaan yang digabungkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya. Keuntungan ini dapat diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger Perseroan Terbatas yang dilandasi motivasi keuntungan selisih nilai harta

---

<sup>70</sup> Muchyar Yara, Op Cit, hal. 45



kekayaan ini merupakan suatu akibat adanya penilaian harta kekayaan perusahaan yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya sehingga perusahaan penerima Merger akan menerima keuntungan dari selisih penilaian harta kekayaan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut.

Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu :

- a. manajemen perusahaan yang menggabungkan diri tidak mampu menjalankan perusahaan secara maksimal sehingga kinerja perusahaan menjadi rendah dan mengakibatkan harga sahamnya pun menjadi rendah.
  - b. Manajemen perusahaan yang menggabungkan diri kurang jeli melihat peluang pasar dan karena itu bidang usaha yang dijalankan kurang diminati investor sehingga harga saham menjadi turun;
  - c. Kebijaksanaan perusahaan yang menggabungkan diri dalam melakukan pembagian laba perusahaan (*dividen*) terbatas sehingga kurang diminati oleh investor dan akibatnya harga saham perusahaan menjadi turun.
- 2) Memperbesar penguasaan pangsa pasar dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak dalam bidang dan tingkat usaha yang sama yang sebelumnya justru merupakan perusahaan saingan (*competitor*). Keuntungan ini dapat diperoleh perusahaan penerima Merger yang dilandasi motivasi meningkatkan penguasaan pangsa pasar. Dengan adanya Merger tersebut, maka penguasaan pasar akan semakin luas, dan hal ini sudah tentu akan meningkatkan daya saing

dan terjaganya kekuatan pasar. Merger perusahaan dengan keinginan untuk perluasan pasar ini, akan mengurangi biaya promosi dan biaya pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan yang baru. Selanjutnya biaya-biaya tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan meningkatkan mutu produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing.

- 3) Memperbesar pendapatan (*income*) perusahaan penerima Merger dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang berbeda. Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger Perseroan Terbatas yang dilandasi motivasi penganekaragaman usaha yang merupakan tindak lanjut tercapainya sinergi keuangan. Kemampuan modal yang semakin kuat, perusahaan akan dapat melakukan peng-anekaragaman bidang usaha. Dengan memiliki keanekaragaman usaha, maka diharapkan suatu perusahaan akan dapat menjaga stabilitas pendapatan (*income*). Sebagai contoh, pada saat sekarang usaha divisi distributor kendaraan bermotor mengalami penurunan omset penjualan, namun pada saat yang sama pada divisi yang lain yaitu divisi penyediaan suku cadang (*spare parts*) dan perbengkelan mengalami peningkatan pendapatan, sehingga secara keseluruhan dari 2 (dua) divisi tersebut *income* atau pendapatan perusahaan dapat tetap terjadi sesuai dengan target yang direncanakan.
- 4) Memperoleh fasilitas pengurangan pajak dengan menggabungkan perusahaan yang mempunyai fasilitas pengurangan pajak karena adanya akumulasi kerugian

yang diderita sebelumnya. Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger usaha yang dilandasi motivasi pada keinginan memperoleh keuntungan di bidang perpajakan. Merger perusahaan ini biasanya dilakukan oleh konglomerat atau biasa terjadi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal antara perusahaan sejenis, misalnya perusahaan A adalah perusahaan yang senantiasa memperoleh keuntungan yang besar, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya pun besar, sedangkan perusahaan B baru meraih keuntungan kecil setelah sekian tahun mengalami kerugian, sehingga perusahaan B masih memiliki fasilitas pembebasan pajak akibat akumulasi karugiannya itu. Dengan melakukan Merger perusahaan B ke dalam perusahaan A, maka keuntungan di bidang perpajakan di peroleh melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan penerima Merger oleh karena adanya fasilitas pembebasan pajak yang dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri. Selain itu ada kemungkinan Merger perusahaan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menghindarkan diri dari penarikan pajak ganda.

- 5) Meningkatkan efisiensi perusahaan penerima Merger melalui pencapaian "*economic of scale*", yaitu suatu keadaan dimana hasil produksi bertambah dua kali lipat, namun total biaya bertambah tidak sampai dua kali lipat.

Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger usaha yang dilandasi motivasi meningkatkan efisiensi yang akan melahirkan "*sinergi baru*". Secara ekonomi dengan bertambahnya aset yang merupakan faktor-faktor komplementer dalam produksi, maka akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda.

Sedangkan keuntungan bagi perusahaan yang menggabungkan diri adalah:<sup>71</sup>

- Terbebas dari kesulitan keuangan yang selama ini menjadi beban perusahaan, karena melalui Merger perusahaan akan terjadi perubahan struktur permodalan;
- Meningkatnya kemampuan manajemen, yang selama ini justru dihindangi kondisi yang tidak efisien;
- Meningkatnya daya saing produk di pasaran, karena melalui Merger perusahaan akan tercapai "*economics of scale*".

#### 1.2. Keuntungan dan Kerugian Merger Perseroan Terbatas Bagi Perekonomian.

Merger Perseroan Terbatas dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Merger perusahaan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, antara lain meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pasar dan portofolio produk. Dengan memperoleh keuntungan dari adanya Merger perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara mikro

---

<sup>71</sup> Siswanto Sudomo, *Prospek Merger di Indonesia*, Majalah Info Bank, Mei 1990, hal. 20

memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro. Tetapi dalam pelaksanaannya apakah Merger Perseroan Terbatas benar-benar dapat mendatangkan keuntungan/manfaat, atau sebaliknya justru merugikan bagi perekonomian makro suatu negara ? Untuk menjawab pertanyaan di atas seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan ahli ekonomi, dan pada akhirnya melahirkan 3 (tiga) pendapat yang saling berbeda mengenai hal tersebut.<sup>72</sup>

1. Pendapat Pertama: "Merger menguntungkan bagi perekonomian nasional"

Menurut kalangan yang berpendapat bahwa Merger menguntungkan bagi perekonomian nasional, karena Merger dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian nasional suatu negara, karena:

- Merger dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, dan pada gilirannya akan berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional;
- Merger dapat membantu masalah kekurangan dana pada perusahaan-perusahaan kecil tetapi memiliki teknologi cukup tinggi, sehingga melalui Merger perusahaan-perusahaan itu dapat memperbesar kapasitas produksinya dan mencapai "*economic of scale*".
- Merger akan melahirkan perusahaan-perusahaan besar (raksasa) yang memiliki kemampuan keuangan yang melakukan investasi dan ekspansi usaha, yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional;

---

<sup>72</sup> Muchyar Yara, Op Cit, hal. 47-51

- Perusahaan-perusahaan raksasa yang terbentuk melalui Merger akan mampu menghasilkan produk-produk yang bersaing (*competitive*), baik di pasaran ekspor, maupun di pasaran domestik, sehingga pada gilirannya akan mendatangkan cadangan devisa nasional.

## 2. Pendapat Kedua : "Merger justru merugikan perekonomian nasional"

Pendapat kedua ini menilai praktek Merger sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bahkan justru bisa merugikan atau membahayakan perekonomian suatu negara.

Hasil penelitian dengari menggunakan pendekatan statistik terhadap pelaksanaan Merger perusahaan yang dilaksanakan dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1997 di Amerika Serikat dalam hubungannya dengan situasi ekonomi makro di negara tersebut, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- o Praktek Merger meningkat jumlahnya sejalan dengan naiknya harga saham-saham pada bursa saham, dan sebaliknya pada saat kapasitas produksi nasional meningkat, jumlah praktek merger justru rendah;
- o Praktek Merger meningkat jumlahnya sejalan dengan turunnya tingkat suku bunga pinjaman bank, dan sebaliknya praktek Merger cenderung menurun sejalan dengan naiknya tingkat suku bunga pinjaman bank.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, bahwa Merger tidak memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro. Sebaliknya, justru kondisi positif perekonomian makro yang mendorong meningkatnya jumlah praktek Merger.

Dilaksanakannya Merger, dengan tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek yang diperoleh dari selisih harga saham di bursa saham dengan nilai harta yang sebenarnya dari perusahaan yang akan digabungkan, dan Merger kurang sekali memberikan perhatian terhadap meningkatnya kapasitas produksi nasional yang melahirkan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro.

Praktek Merger juga meningkat pada saat tingkat suku bunga pinjaman bank rendah. Ini menunjukkan bahwa Merger dilaksanakan untuk tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek, melalui penggunaan dana murah guna membayar kompensasi kepada para pemegang saham yang digabungkan dan memperoleh harta perusahaan yang digabungkan yang nilainya jauh lebih tinggi.

3. Pendapat Ketiga : "Merger dapat menguntungkan bagi perekonomian makro bilamana cenderung negatifnya dibatasi/dihilangkan"

Pendapat ketiga ini merupakan jalan tengah antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Berdasarkan pendapat ketiga bahwa tidak sepenuhnya benar bilamana beranggapan praktek Merger dipastikan memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro, karena bentuk-bentuk Merger horizontal dan Merger vertical seringkali dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya situasi pasar yang monopolistis melalui penguasaan pangsa pasar secara dominan oleh sebuah atau sekelompok perusahaan. Sebaliknya juga tidaklah tepat mengatakan bahwa seluruh praktek Merger dapat mengakibatkan dampak yang bersifat negatif terhadap perekonomian makro, karena harus diakui bahwa bentuk-bentuk Merger konglomerat sangat bermanfaat untuk

mendorong adanya peningkatan efisiensi, pencapaian "*economic of scale*", perluasan usaha melalui diversifikasi, dan peningkatan investasi, yang kesemuanya itu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Merger Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya senantiasa melahirkan sikap ganda yang saling bertentangan, dimana pada satu sisi Merger perusahaan dapat melahirkan dampak positif bagi perseroan itu sendiri sehingga menjadi besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Tetapi pada sisi lain, Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

## 2. Akibat Hukum Merger Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Setiap perbuatan hukum mengakibatkan akibat hukum, demikian pula perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi dimensi, yaitu:<sup>73</sup>

- Akibat hukum yang bersifat internal dan materiil baik pada pihak-pihak internal maupun eksternal;

---

<sup>73</sup> Sri Redjeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.



- Akibat hukum yang mempunyai dampak lebih luas yaitu pengaruh yang bersifat ekonomi;
- Akibat yang hampir terasa atau tidak yaitu pengaruh sosial dan psikologis.

Dengan demikian pengaruh yang timbul atas tindakan Merger Perseroan Terbatas dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis dan pengaruh-pengaruh yang bersifat non-yuridis.

Pengaruh yang bersifat yuridis dapat terjadi atau timbul, baik terhadap institusi atau lembaga maupun terhadap pendukung institusional, sedangkan pengaruh-pengaruh yang bersifat non yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum Merger perusahaan.

Pengaruh yang bersifat yuridis terhadap institusi atau lembaga, dengan terjadinya Merger akan menimbulkan pengaruh terhadap eksistensi dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Bagi lembaga yang tetap eksis akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain mengenai organ Perseroan Terbatas dan pendukungnya, tanggungjawab dan kewajiban, hak-hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga. Sedangkan bagi lembaga yang tidak eksis di samping kedudukannya sebagai badan hukum menjadi bubar, perlu melakukan tindakan-tindakan yuridis terhadap:

1. Kewajiban-kewajiban internal termasuk kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewajiban lain yang harus dipenuhi termasuk pajak yang belum dibayar dan sebagainya.
2. Pengaruh terhadap institusi baik internal maupun eksternal dapat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyangkut eksistensi Perseroan Terbatas yang bersangkutan apakah tetap eksis atau tidak karena adanya perseroan baru dan sebagainya;
- b. Adanya likuidasi yang diikuti oleh pembubaran, atau
- c. Adanya pembubaran tanpa likuidasi.

Ketiganya menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak kecil, baik kepada pemegang saham maupun terhadap pihak ketiga atas transaksi-transaksi yang belum tuntas.

Pengaruh yuridis lainnya adalah pengaruh terhadap pendukung institusional, dalam hal ini hak dan kewajiban bertimbal balik harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang pernah diadakan. Pendukung institusi ini dimaksudkan adalah semua pihak yang mempunyai kaitan dengan institusi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sumber dana, masyarakat pelanggan/konsumen dan negara sebagai penerima pajak.

Pengaruh-pengaruh yang sifatnya non-yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum dari Merger Perseroan Terbatas. Dalam hal ini dibutuhkan perhatian dengan pendekatan yang memerlukan kajian psikologi antara lain mengenai akibat putusnya hubungan kerja pada setiap tingkat atau jenjang di lembaga yang bersangkutan, sikap pemegang saham lama/baru terhadap Sumber Daya Manusia yang tetap bertahan/dipertahankan dan sebagainya.

Pengaruh yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non-yuridis tersebut di atas, ada kemungkinan menimpa pihak ketiga seperti masyarakat dan kreditur. Pengaruh yang

menimpa pihak ketiga justru sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Merger Perseroan Terbatas sebagai perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap Perseroan Terbatas itu sendiri, karyawan, kreditur dan masyarakat, bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.

#### 2.1. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Yang Terlibat Merger.

Perseroan Terbatas yang melakukan Merger dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, antara lain meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan portofolio produk. Dengan memperoleh keuntungan dari adanya Merger perusahaan perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara ekonomi mikro memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro.

Dengan dilakukannya Merger, perseroan akan menjadi lebih kuat, sehingga perseroan yang telah melakukan Merger menjadi lebih besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum baik secara internal maupun eksternal. Secara eksternal Merger akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi perusahaan sebagai badan hukum, pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan karyawan. Sedangkan secara internal Merger mempunyai akibat hukum bagi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, karena status hukum atau keberadaan mereka terhadap perusahaan induknya menjadi berubah yang semula merupakan anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kemudian setelah melakukan Merger beralih menjadi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menerima Merger kecuali diperjanjikan lain.

Akibat hukum perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas terhadap perusahaan yang menggabungkan diri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 107 secara tegas telah ditentukan bahwa dalam hal terjadi Merger, maka yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Apabila pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada perseroan hasil Merger dan pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi saham perseroan hasil Merger.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Penggabungan Perseroan

Terbatas yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah menetapkan saat berlakunya pembubaran perseroan yang menggabungkan diri. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar.
- (2) Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan.
- (3) Apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Walaupun saat berlakunya secara efektif perseroan yang menggabungkan diri bubar telah dimuat secara tegas dalam Pasal 18 Peraturan Peraturan tersebut, akan tetapi perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini Direksi sudah dinyatakan demisioner, tidak boleh melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merger, sejak tanggal penandatanganan akta

Merger. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggungjawab Direksi yang bersangkutan.

## 2.2. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Merger Perseroan Terbatas juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham, menurut Pasal 107 Ayat (3) huruf b dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Perseroan Terbatas terjadi peralihan pemegang saham, yang berbunyi:

"Pemegang saham yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil Merger atau konsolidasi"

Peralihan ini terjadi karena berdasarkan titel umum tanpa adanya perbuatan penyerahan (*levering*), tetapi cukup hanya dengan akta Merger. Dengan demikian hak dan kewajiban ini dan tuntutan terhadap perseroan asal beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil Merger, termasuk di dalamnya hak tanggungan yang dipegang oleh perseroan asal.<sup>74</sup>

Adanya peralihan pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima Merger sebenarnya bukan merupakan masalah, kecuali bila ada di antara pemegang saham perusahaan yang digabungkan (biasanya adalah pemegang saham minoritas) menolak pelaksanaan Merger, maka kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan cara menjual sahamnya.

---

<sup>74</sup> Yunus Husein, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta 10-11 September 1997, hal. 3-4

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan tentang Merger. Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

### 2.3. Akibat Hukum Terhadap Karyawan.

Salah satu tujuan Merger Perseroan Terbatas adalah untuk efisiensi perusahaan, untuk terciptanya efisiensi perusahaan, Perseroan Terbatas hasil Merger tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima Merger, sehingga dengan adanya Merger Perseroan Terbatas dapat mengurangi kesempatan kerja bagi karyawan. Berkurangnya kesempatan kerja guna untuk mencapai efisiensi perusahaan diperlukan adanya rasionalisasi karyawan dengan jalan mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena Merger perusahaan dapat mengakibatkan kesempatan kerja bagi karyawan, maka kepentingan karyawan harus dilindungi. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan, berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah terjadinya Merger yang sudah

tentu dalam hal ini banyak peraturan ketenagakerjaan harus dipedomani.

#### 2.4 Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga.

Merger Perseroan Terbatas dapat pula menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, khususnya kreditur dan masyarakat. Menurut Pasal 107 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Aktiva dan pasiva yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil Merger atau konsolidasi"

Dari ketentuan tersebut di atas, peralihan aktiva dan passiva yang diakibatkan Merger Perseroan Terbatas, terjadi berdasarkan titel umum tanpa adanya penyerahan (*levering*), tetapi cukup dengan akta Merger. Dengan demikian hak dan kewajiban serta tuntutan terhadap aktiva dan pasiva beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil Merger perusahaan.

Dengan adanya perubahan status hukum asset Perseroan Terbatas tersebut berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan timbulnya atau lahirnya kewajiban Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum Merger dilakukan, seluruhnya menjadi beban dan tanggungjawab Perseroan Terbatas yang menerima Merger. Dengan demikian Perseroan Terbatas yang menerima Merger harus melunasi semua utang Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum Merger dilakukan.

Perubahan status aktiva dan pasiva tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat



dengan keberadaan utang dan piutang perseroan yang terjadi sebelum Merger dilakukan. Hal ini menjadi lebih penting ketika Perseroan Terbatas yang menerima Merger menghadapi tuntutan atau gugatan pihak ketiga, khususnya kreditur atas segala utang yang pernah diikat oleh Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri sebelum Merger dilakukan.

#### 2.4. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas selain bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan, efisiensi dan efektif, Merger Perseroan Terbatas secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat negatif terhadap persaingan usaha, yaitu:

- Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi kekuatan pasar "*market power*" menjadi tinggi;
- semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.<sup>75</sup>

Merger Perseroan Terbatas yang menghasilkan sinergi kerja pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, memang akan mempunyai kecenderungan untuk penguasaan pasar secara monopoli yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat. Adanya kecenderungan penguasaan pasar secara monopoli dan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya yang diakibatkan Merger perusahaan, pada akhirnya merugikan masyarakat konsumen karena dengan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masyarakat akan membayar lebih tinggi atas suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

---

<sup>75</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal. 43

### C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS

Pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat dari Merger Perseroan Terbatas, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hukum sebagai instrumen harus memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, misalnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

#### 1. Kepentingan Pihak-Pihak Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.

Merger Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya senantiasa melahirkan sikap ganda yang saling bertentangan, dimana pada satu sisi Merger perusahaan dapat melahirkan dampak positif bagi perseroan itu sendiri sehingga menjadi besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Tetapi pada sisi lain Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas harus diupayakan meminimalkan resiko dan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tersebut. Jadi dalam pelaksanaan Merger perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan, kepentingan kreditur dan kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sudah dijelaskan agar setiap perbuatan Merger perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, saham minoritas, karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat. Bunyi Pasal 104 adalah sebagai berikut:

- (1). Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:
  - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan;
  - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Dalam Merger Perseroan Terbatas. kepentingan pemegang saham minoritas perlu diperhatikan karena kedudukannya berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan. Selain pemegang saham, pihak yang sering dirugikan dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas adalah karyawan. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris. Karyawan dikatakan sebagai pihak yang sangat lemah karena sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan "*policy*" maupun operasional perusahaan, sehingga kepentingan karyawan harus

diperhatikan dalam Merger perusahaan, sehingga kepentingan karyawan harus diperhatikan dalam Merger Perseroan Terbatas. Sebab dalam Merger Perseroan Terbatas, seringkali terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dan rasionalisasi usaha.

Pihak lain yang perlu dilindungi adalah kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal yang terkait dalam Merger Perseroan Terbatas. Merger Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan pasiva (*asset*) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger.

Selain hal tersebut diatas, pihak yang harus dilindungi yaitu masyarakat, karena Merger Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## 2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum pada prinsipnya dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perseorangan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki badan hukum, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan Terbatas, yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Dalam menjalankan perusahaan, Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal pengurusan perseroan, serta berwenang mewakili perseroan. Oleh karena itu keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan, karena Perseroan Terbatas sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*". Sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam hal Merger Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Dalam rangka menjalankan usaha perseroan, khususnya apabila perseroan tersebut akan melaksanakan Merger perusahaan, maka Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi masing-masing Perseroan menyusun rencana Merger yang dituangkan dalam rancangan Merger. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum atau meminimalkan resiko Merger Perseroan Terbatas yang akan merugikan pihak-pihak tertentu, maka dalam penyusunan rancangan Merger, Direksi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memperhatikan:

- 1) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap

saham perseroan hasil-hasil Merger, dan cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak ketiga, khususnya kreditur terlindungi;

- 2) Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri, hal ini diharapkan agar masalah karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri dapat diperhatikan, sehingga dalam Merger Perseroan Terbatas yang akan dilaksanakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 3) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Merger perseroan, hal ini dimaksudkan agar pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dapat memperoleh haknya, yaitu untuk menjual sahamnya secara wajar dan bebas menawarkan sahamnya kepada pihak yang berminat.

Kemudian, Direksi wajib mengumumkan rancangan Merger Perseroan Terbatas dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 105 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Kewajiban untuk mengumumkan rancangan Merger dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap Merger perusahaan tersebut.

Setelah rancangan Merger mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi wajib untuk mengajukan persetujuan, menyampaikan laporan dan memberitahukan

perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil Merger perusahaan dengan melampirkan rancangan Merger perseroan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Setelah Anggaran Dasar perseroan hasil Merger mendapat persetujuan, telah diterimanya laporan dan pemberitahuan oleh Menteri Kehakiman, Direksi mempunyai kewajiban untuk mengumumkan hasil Merger Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Merger perusahaan dilakukan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Ketentuan kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam hal pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut di atas, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam Merger Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi perseroan yang akan melakukan Merger diri dan menerima Merger masing-masing menyusun usulan rencana Merger. Usulan rencana Merger tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris (Pasal 7);
- 2) Direksi wajib menyusun rancangan Merger, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger (Pasal 9);

- 3) Direksi wajib mengumumkan ringkasan rencana Merger dalam 2 (dua) surat kabar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan Merger paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan (Pasal 9);
- 4) Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 14)
- 5) Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Merger, Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merger. Apabila Direksi melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi yang bersangkutan (Pasal 19)
- 6) Direksi perseroan yang akan melakukan Merger wajib menyampaikan surat tercatat rancangan Merger kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33);
- 7) Direksi perseroan hasil perseroan wajib mengumumkan hasil Merger Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua)



surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya Merger (Pasal 34);

- 8) Dalam proses pelaksanaan Merger Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara perseroan dengan Direksi, maka Direksi perseroan wajib menuangkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan Merger. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Komisaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban Komisaris, sedangkan kewajiban dan tanggungjawab Komisaris dalam Merger Perseroan Terbatas adalah memberikan persetujuan terhadap usulan rencana Merger. Sebagai pengawas perusahaan, Komisaris dituntut untuk mengawasi pelaksanaan Merger perseroan, sehingga dalam Merger tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak. Dengan demikian dalam menyusun rencana Merger, Komisaris harus memberi pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam pelaksanaan Merger.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas secara tersurat tidak memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Direksi dan Komisaris dalam hal memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, namun dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, Direksi bertindak sebagai penyusun rencana Merger Perseroan

Terbatas. Dalam menyusun usulan rancangan Merger tersebut, Direksi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, dimana pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas secara tersirat Direksi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Komisaris sebagai pengawas dalam perseroan, dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan usulan rencana Merger yang telah disusun oleh Direksi. Dalam memberikan persetujuan usulan rencana Merger, Komisaris harus memantau apakah kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang lemah telah terakomodasi dalam rencana Merger tersebut. Dalam hal usulan rencana Merger belum atau tidak memuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu, maka Komisaris sapat menolak rencana Merger dengan tidak menyetujui usulan Merger tersebut.

Direksi dan Komisaris perseroan, mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas.

Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan dimulai pada saat penyusunan rencana Merger, karena dalam penyusunan rencana Merger perusahaan, terjadi negosiasi mengenai status pemegang saham minoritas, karyawan dan

kreditur, baik terhadap perusahaan yang menggabungkan maupun terhadap perusahaan yang menerima Merger, serta mencari jalan ke luar dengan menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap kerugian yang akan timbul. Dalam membuat rencana Merger, Direksi harus benar-benar memperhatikan pihak-pihak tertentu, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat, sehingga resiko yang dapat menimbulkan kerugian atas pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas diminimalkan.

Dalam menyusun rencana Merger Perseroan Terbatas, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dicerminkan adanya negosiasi Direksi dalam memperjuangkan kebebasan pemegang saham minoritas untuk menentukan setuju atau menolak Merger Perseroan Terbatas, dan apabila menolak yang bersangkutan memperoleh harga yang wajar atas saham yang dimilikinya.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dapat dilakukan oleh Direksi dengan cara negosiasi untuk meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan apabila pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan, maka Direksi harus memperjuangkan hak-hak yang harus diperoleh karyawan apabila diputuskan hubungan kerjanya. Sedangkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, Direksi harus mengusulkan adanya perjanjian pengalihan utang dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger, serta pembayaran utang-utang perusahaan yang menggabungkan diri dapat dilaksanakan tepat waktu.

Penyusunan rencana Merger di dalamnya memuat *prospektus* perusahaan hasil Merger. Dalam menyusun *prospektif*

perusahaan, Direksi harus memperhatikan etika bisnis dan prinsip-prinsip usaha yang sehat sehingga nantinya perusahaan hasil Meger tidak mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang nantinya dapat merugikan masyarakat dan persaingan usaha.

Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris berakhir setelah Perseroan Terbatas hasil Merger menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi kepada karyawan, pemenuhan utang kepada kreditur, terjualnya saham dari pemegang saham minoritas dengan harga wajar dan untuk jangka panjang mengusahakan agar perusahaan hasil perusahaan hasil Merger tidak melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### 3. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, riskan akan timbulnya akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam Merger Perseroan Terbatas diperlukan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selengkapnya berbunyi:

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Keharusan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, apabila dalam perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang cukup hanya dapat dilakukan oleh Direksi masing-masing perseroan tanpa mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka tidak mustahil perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas itu dapat merugikan para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, dan apabila telah terlanjur dilakukan maka sulit bagi pemegang saham itu untuk mengoreksinya kembali.

Adanya pemegang saham mayoritas, menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Selain itu juga, dalam hal pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan adalah hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh organ perseroan. Jadi nampak suatu diskriminasi antara yang kuat dan lemah.

Pemegang saham mempunyai hak perseorangan yang dapat dipertahankan serta dapat dituntut pelaksanaan haknya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak untuk mengajukan gugatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang baik bagi pemegang saham, namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut dalam pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas dapat menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan, meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain hak perseorangan, Undang-Undang juga memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh Direksi ataupun oleh Komisaris.

Pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang saham, ia berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang yang akan merugikan kepentingannya.

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang akan melakukan Merger. Berdasarkan Pasal 104 Ayat (2), pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana Merger untuk melakukan Merger. Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 104 Ayat (2) untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar itu tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak menyetujui rencana Merger yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu meminta kepada perseroan agar mengusahakan sahamnya dibeli oleh pihak lain.

Di dalam hal pemegang saham minoritas menolak Merger perusahaan dan tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan Merger perusahaan.

Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu, pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan

dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 juga memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan dalam Merger Perseroan Terbatas. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya sehingga sering dirugikan akibat Merger Perseroan Terbatas.

Karyawan dalam perusahaan yang akan melakukan Merger merupakan salah satu pihak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum Merger dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan karyawan dalam hubungan adanya Merger Perseroan Terbatas, yaitu dalam Merger Perseroan Terbatas selalu diikuti dengan pengalihan status karyawan dari perusahaan yang menggabungkan dan dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi usaha tidak jarang sebagian karyawan diputuskan hubungan kerjanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal terjadi Merger Perseroan Terbatas. Merger Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan passiva (*asset*) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya



pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger.

Perlindungan bagi kreditur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dijumpai dalam Pasal 104 Ayat (1) huruf b, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 Ayat (2) huruf f angka 3, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 33.

Perlindungan hukum dalam hal Merger Perseroan Terbatas juga dilakukan pada masyarakat. Dengan adanya Merger tersebut, mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu masyarakat harus mendapat perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap persaingan usaha tidak sehat, mendapat angin segar setelah Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana Merger Perseroan Terbatas menjadi salah satu obyek pengaturan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah tersebut terjadi dalam Merger Perseroan Terbatas, antara lain mereka lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi.<sup>76</sup>

Lemah secara struktural maksudnya adalah kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan

---

<sup>76</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal.127

pihak lainnya. Menurut sistem hukum positif kita, dari segi "*Corporate Law*", kedudukan karyawan/pekerja di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris, karena karyawan sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan *policy* maupun operasional perusahaan.

Lemah secara finansial maksudnya adalah kedudukannya kuat secara yuridis, misalnya pemegang saham minoritas, tetapi karena ikatan finansial lemah, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya lemah. Sedangkan lemah secara lokalisasi maksudnya pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan kontraktual, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan, maupun hubungan non kontraktual, misalnya dengan persaingan yang tidak fair.

--- Han'S ---

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana untuk menentukan, mengembangkan atau untuk mengkaji suatu kebenaran pengetahuan. Menentukan berarti berusaha untuk memperoleh suatu kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang sudah ada, menguji kebenaran jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>77</sup> Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan benar perlu dilakukan dengan metode penelitian guna membantu untuk menentukan, merumuskan atau menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.

Metode itu sendiri pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Bertitik tolak pada hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian lapangan yaitu langsung ke obyek permasalahan, sesuai dengan apa yang penulis rumuskan dalam tesis ini.

---

<sup>77</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal.15

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena penulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.

Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang meliputi penelitian yang berupa usaha penemuan hukum "*in concreto*".<sup>78</sup> Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan yaitu dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder.<sup>79</sup> Dalam penelitian normatif ini yang berlaku adalah teori-teori hukum normatif sebagai kerangka konseptualnya. Dalam penulisan ini digunakan penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dari peraturan-peraturan hukum tertulis.<sup>80</sup>

Taraf sinkronisasi vertikal yaitu sinkronisasi suatu peraturan berdasarkan hierarkis peraturan perundang-undangan, sedangkan sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan lain dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain yang mempunyai hubungan timbal balik.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu untuk mengetahui akibat hukum dari Merger Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam pendekatan yuridis empiris ini juga dimaksudkan

---

<sup>78</sup> Rony Hanintijo Soemitro, *Matodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12.

<sup>79</sup> Ibid, hal.19

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hal.50.

untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain,<sup>81</sup> oleh karena itu penelitian ini mempergunakan teori-teori sosial mengenai hukum atau teori sosial dan kerangka konseptualnya bersifat "*logico-empiris*".<sup>82</sup>

Penelitian yuridis empiris atau sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) yaitu dengan cara melakukan pengamatan, studi lapangan dan wawancara.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif dan analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sehingga dari analisis ini dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai Merger Perseroan Terbatas yang paling ideal dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PT. Bank Permata, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, dan wawancara dengan beberapa Notaris.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : data primer dan data sekunder.

---

<sup>81</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, op cit, hal.34

<sup>82</sup> Ibid, hal.36.

- a. Data Primer, berupa data yang langsung diperoleh dari lapangan. Yaitu data yang didapat dari Kantor Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PT. Bank Permata, PT. Bank Danamon, Tbk, dan Notaris.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat mendukung data primer, yang diperoleh tidak langsung di lapangan, melainkan di peroleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>83</sup> Dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen, majalah serta sumber bacaan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, dilakukan dengan beberapa cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang diperoleh. Data yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Atas dasar hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara.

Yaitu melakukan wawancara mendalam.<sup>84</sup> dan wawancara terstruktur.<sup>85</sup> dilakukan kepada Kantor Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PT. Bank Permata, PT. Bank Danamon, Tbk dan beberapa Notaris.

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1985, hal.14

<sup>84</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op Cit, hal.61.

<sup>85</sup> Lexi J. Moleong, Op Cit, hal. 138

b. Studi Kepustakaan dan dokumen.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1). Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

2). Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu buku-buku ilmiah, hasil riset, majalah ilmiah dan sebagainya.

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, dengan mengkaji sejumlah literatur seperti peraturan perundang-undangan, makalah, laporan hasil penelitian, buku artikel dan surat kabar yang berkenaan dengan Merger Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

--- Han' S ---

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian di Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, wawancara dengan beberapa Notaris, dan wawancara dengan pihak Perseroan Terbatas, dalam hal ini PT. Bank Permata dan PT. Bank Danamon, Tbk; maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

### A. HASIL PENELITIAN

#### **1. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas.**

##### **1.1. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.**

Permohonan pengesahan akta pendirian dan pelaporan akta perubahan Anggaran Dasar dan Merger Perseroan Terbatas yang diajukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dari tahun 1998 - 2002 telah diperoleh data-data sebagai berikut :

Tabel 1.

Permohonan pengesahan akta pendirian dan pelaporan akta perubahan Anggaran Dasar dan Merger Perseroan Terbatas yang diajukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  
dari th. 1998 -2002



No.	Tahun	Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	Permohonan Persetujuan Akta Perubahan dan Pelaporan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger.
1.	1998	48.058	32
2.	1999	33.381	37
3.	2000	41.062	43
4.	2001	28.441	46
5.	2002	43.521	49

Permohonan pengesahan akta pendirian dan pelaporan akta perubahan Anggaran Dasar dan Merger Perseroan Terbatas yang diajukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 telah terjadi pertambahan yang signifikan, meskipun pada tahun 2001 telah mengalami penurunan. Hal tersebut dapat diketahui dari Tabel.1.tabel tentang permohonan pengesahan akta pendirian dan pelaporan akta perubahan Anggaran Dasar dan Merger Perseroan Terbatas yang diajukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas yang telah melakukan Merger dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dapat diperhatikan pada tabel.2, begitu juga dengan alasan dan tujuan merger dari masing-masing Perseroan Terbatas yang telah melakukan Merger, dapat lihat pada tabel.2 dibawah ini :

Tabel 2.  
Perseroan Terbatas Yang Telah Melakukan Merger  
dari tahun 1998 – 2002

No	Nama Perseroan	Melakukan Merger dengan	Alasan Merger	Tujuan Merger
1.	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.	PT. Bank Tiara Asia Tbk PT. Bank Tamara Tbk PT. Bank Rama Tbk. PT. Bank Duta Tbk. PT. Jaya Bank Internasional. PT. Bank Risjad Salim Internasional. PT. Bank Nusa Nasional. PT. Bank Pos Nusantara.	Restrukturisasi	Penyehatan Perusahaan
2.	PT. Zipco Indonesia	PT. Sp.Zipco Indonesia	Penyehatan Perusahaan	Memperluas Pangsa Pasar
3.	PT. Nestle Indonesia	PT. Nestle Beverages Indonesia PT. Nestle Distribution Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Usaha</li> <li>▪ Penyehatan Usaha</li> <li>▪ Memperluas Bisnis Utama</li> <li>▪ Memperkuat Permodalan</li> <li>▪ Restrukturisasi</li> </ul>	Diversifikasi Usaha
4.	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Anak perusahaan dalam satu group	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyehatan Perusahaan</li> <li>▪ Memperkuat Permodalan</li> </ul>	Memperluas Pangsa Pasar Memperluas Bisnis Utama

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Restrukturisasi Perusahaan</li> </ul>	
5.	PT. Delitama Indonesia	PT. Sarana Sawalindu Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyehatan Perusahaan</li> </ul>	Restrukturisasi Utang
6.	PT. Primus Finansial Services	PT. Indo Artha Multi Finance	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan Usaha</li> <li>▪ Memperluas Bisnis Utama</li> </ul>	Memperluas Pangsa Pasar
7.	PT. Bank Permata	PT. Bank Bali PT. Bank Universal PT. Bank Prima Ekspres	Restrukturisasi	Penyehatan Perbankan

Pelaksanaan dari Merger Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas secara umum dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam PP No.27 tahun 1998. Akan tetapi jika Perseroan Terbatas yang melakukan Merger tersebut adalah bank, maka tata cara disamping berlaku ketentuan PP No.27 tahun 1998 juga berlaku PP No.28 tahun 1999.

Bahkan jika salah satu Perseroan Terbatas yang melakukan Merger tersebut adalah Perseroan Terbatas yang berstatus terbuka/publik, maka disamping berlaku ketentuan PP No.27 tahun 1998 dan PP No.28 tahun 1999 juga berlaku ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Anisah, SH, Notaris, wawancara, tgl. 10 Nopember 2003.

Penelitian ini hanya dibatasi pada Perseroan Terbatas bidang Perbankan, dalam hal ini hanya meneliti di PT. Bank Permata dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Permata merupakan bank hasil merger dari PT. Bank Bali, PT. Bank Universal dan PT. Bank Prima Ekspres, yang melakukan merger dengan alasan untuk restrukturisasi perusahaan, sedangkan maksud merger dari PT. Bank Permata adalah untuk penyehatan perbankan.

Dalam praktek, prosedur Merger Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Merger Perseroan Terbatas, yaitu <sup>87</sup>:

#### 1. Syarat Formil

- Perseroan yang akan menggabungkan diri dan perseroan yang akan menerima Merger harus membuat usulan rencana Merger yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan Merger;
- (2) Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
- (3) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap saham perseroan hasil Merger;
- (4) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil Merger;

---

<sup>87</sup> Supri, SH, Bagian Legal PT. Bank Mandiri, wawancara tgl. 19 Agustus 2003

- (7) Neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil Merger, dalam hal perseroan yang melakukan Merger tergantung dalam satu group atau antar group.
- (8) Persetujuan atas usulan rencana Merger dari komisaris masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan.
- Rancangan Merger yang dibuat bersama oleh Direksi perseroan yang melakukan Merger, yang memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger yang telah disetujui oleh Komisaris dari masing-masing perseroan yang melakukan Merger.
  - Pernyataan yang berisi penegasan dari perseroan yang akan menerima Merger mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.
  - Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rincian Merger.
  - Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan Merger beserta konsep akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Merger.

## 2. Syarat Materiil

Selain harus memenuhi persyaratan formil tersebut, Merger usaha juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yaitu <sup>80</sup> :

- Penggabungan usaha hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- Penggabungan usaha tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas atau pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum pemegang Saham mengenai penggabungan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Penggabungan usaha harus memperhatikan kepentingan kreditur.
- Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dicapai, maka ketentuan mengenai quorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

---

<sup>88</sup> Supri, SH, karyawan bagian Legal PT. Bank Mandiri, wawancara tgl. 19 Agustus 2003

- Penggabungan usaha tidak boleh menciptakan persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta penggabungan usaha juga tidak boleh menimbulkan monopoli dan monopsoni dalam segala bentuk yang merugikan masyarakat.

Disamping beberapa persyaratan tersebut diatas, jika salah satu/lebih perseroan yang melakukan Merger adalah perseroan terbuka/publik, maka harus pula memenuhi ketentuan persyaratan keterbukaan (transparasi) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 84 Undang-Undang No.1 tahun 1995 beserta Peraturan Pemerintahnya<sup>89</sup>.

Jika perseroan yang melakukan Merger adalah bank, maka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, sebagaimana Pasal 4 PP No.28 tahun 1999. Ketentuan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia tersebut, juga berlaku bagi Merger yang dilakukan atas inisiatif BPPN.

Merger usaha di bidang Perbankan diatur dalam ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, terdapat satu Pasal yang mengatur mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, yaitu Pasal 28.

---

<sup>89</sup> Supri, SH, karyawan bagian Legal PT. Bank Mandiri. wawancara tgl. 19 Agustus 2003

Tata Cara Merger Bank menurut PP No.28 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

a. Inisiatif Untuk Melakukan Merger Bank

Inisiatif untuk melakukan suatu Merger Bank berasal dari beberapa pihak, sebagai berikut:

- o Atas inisiatif bank yang akan melakukan Merger tersebut.
- o Atas permintaan Bank Indonesia
- o Atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus ini adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dari Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dewasa ini badan tersebut sudah terbentuk, yaitu Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Selanjutnya tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan Merger masing-masing atas inisiatif ketiga badan tersebut diatas, dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dari Tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank Umum.

b. Izin Merger Bank

Izin untuk melakukan Merger Bank (dan juga konsolidasi dan akuisisi) mesti diperoleh dari Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian Bank Indonesia sebagaimana dianut oleh Undang-undang Bank Indonesia No.32 Tahun 1999.



Sebelumnya izin Merger bank harus diajukan kepada Menteri Keuangan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat dimintakan izin Merger kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Merger dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing perusahaan yang akan dimerger;
- Pada saat terjadinya Merger, maka jumlah aktiva bank hasil Merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia;
- Bank hasil Merger harus memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Direksi dan Komisaris dari bank hasil Merger tidak boleh masuk ke dalam daftar orang tercela (harus lulus fit and proper test).

Izin Merger diajukan kepada Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan merger dan satu tembusan dari permohonan izin Merger tersebut dengan pengajuan izin Merger diajukan pula permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil Merger kepada Menteri Kehakiman. Bersamaan dengan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil Merger dilampirkan pula:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
- Akta Merger.

Di samping itu permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia juga dengan melampirkan:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
- Akta Merger.

Dalam proses pelaksanaan Merger ada satu dokumen yang disebut dengan Rancangan Merger. Rancangan Merger bersama-sama dengan konsep akta Merger wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perusahaan. Selanjutnya, konsep akta merger yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan ke dalam Akta Merger yang harus dibuat oleh Notaris dan dengan memakai bahasa Indonesia. Akta merger tersebut berisikan pokok-pokok sebagaimana terdapat dalam dokumen yang disebut Rancangan Merger itu.

Rancangan Merger di samping berisikan hal-hal sebagaimana terdapat dalam usulan rencana Merger, berisikan pula penegasan dari bank yang akan menerima Merger mengenai penerimaan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.

Sementara usulan rencana Merger yang isinya juga dimuat dalam Rancangan Merger berisikan hal-hal seperti yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (2) PP No.28 Tahun 1999.

Berbeda dengan Merger pada umumnya yang menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 masih dimungkinkan dilakukan melalui likuidasi, maka suatu Merger Bank menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini hanya mungkin dilakukan tanpa likuidasi. Konsekuensinya seluruh aktiva dan pasiva dari Bank yang akan bubar karena

Merger beralih karena hukum kepada bank yang eksis setelah Merger. Dengan demikian, jika akhirnya ada bank yang dibubarkan setelah Merger, maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan secara administratif belaka, tanpa diikuti dengan tindakan likuidasi.

Jika tidak ada tindakan pemberesan terhadap asset-assetnya. Telah dijelaskan bahwa Merger bank ada yang dilakukan dengan mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu merger dianggap bubar sejak tanggal persetujuan dari Menteri Kehakiman. Di samping itu pula yang dilakukan dengan hanya pelaporan kepada Menteri Kehakiman .

Pengaturan tentang kapan saat bubarnya perusahaan juga berbeda, yakni digantungkan kepada sistem mana yang dipilih. Jika yang dipilih adalah sistem dengan mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu Merger dianggap bubar sejak tanggal Persetujuan dari Menteri Kehakiman. Akan tetapi manakala yang dipilih adalah system dimana perubahan anggaran dasar dengan hanya memberi pelaporan saja kepada Menteri Kehakiman, maka bubarnya bank yang melakukan Merger terhitung sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar di dalam daftar perusahaan.

Untuk memenuhi unsur transparansi dari suatu Merger, maka ketentuan perundang-undangan mengharuskan agar

dilakukan berbagai pengumuman, khususnya bagi suatu Merger Bank maka Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 mengharuskan adanya pengumuman sebagai berikut:

- Pengumuman dalam dua surat kabar harian
- Pendaftaran dalam daftar perusahaan
- Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
- Pemberitahuan secara tertulis
- Pengumuman secara lain.

Siapa saja dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Merger asal ada alasan yang sah secara hukum. Akan tetapi selain keberatan umum tersebut, ada beberapa golongan yang mendapatkan perlakuan khusus secara yuridis, jika ingin mengajukan keberatan-keberatan terhadap Merger tersebut yaitu sebagai berikut:

- Pihak Pemegang saham Minoritas
- Pihak Kreditor
- Pihak Karyawan
- Pihak tersaing secara tidak sehat.

Akan tetapi, di dalam PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37, perlakuan khusus hanya diberikan kepada pihak kreditor dan pemegang saham minoritas saja. Dalam hal ini pihak kreditor dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas rencana Merger yang telah dituangkan dalam suatu Rancangan Merger. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal

ini keberatan tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, guna memperoleh persetujuannya.

### **1.2. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Pemegang saham, Karyawan, Kreditur dan Masyarakat Dengan Adanya Merger Perseroan Terbatas.**

Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum baik secara internal maupun eksternal. Secara internal Merger akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi perusahaan sebagai badan hukum, pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan karyawan. Sedangkan secara eksternal Merger mempunyai akibat hukum bagi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, karena status hukum atau keberadaannya mereka terhadap perusahaan induknya menjadi berubah yang semula merupakan anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kemudian setelah melakukan Merger beralih menjadi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menerima Merger kecuali diperjanjikan lain.

Akibat Merger Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga/Kreditur dari perseroan yang menggabungkan diri. Didalam praktek yang terjadi selama ini, status piutang kreditur dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri, beralih menjadi piutang kreditur pada Perseroan Terbatas yang menerima Merger. Peralihan piutang tersebut terjadi karena hukum tanpa melalui perjanjian khusus pengalihan hutang.

Jadi dengan telah berlakunya Merger Perseroan Terbatas secara efektif, maka terhitung mulai tanggal berlakunya Merger Perseroan Terbatas tersebut, semua utang/tanggungjawab

Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri, beralih kepada Perseroan Terbatas yang menerima Merger. Akta Merger merupakan bukti adanya peralihan utang/tanggungjawab tersebut.

Di dalam praktek, peralihan utang tersebut telah berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah-masalah hukum baru yang sulit diselesaikan. Selama ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak kreditur dipenuhi, maka masalah yang berkaitan dengan kreditur tidak akan timbul. Para kreditur merasa lebih aman dan terjamin piutangnya jika terjadi Merger Perseroan Terbatas. Menurut penjelasan para responden, bahwa selama ini belum pernah terjadi ada kreditur yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, walaupun telah diberi kesempatan selama 7 hari bagi kreditur yang merasa keberatan atas pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dapat mengajukan keberatan tertulis kepada masing-masing Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Merger.

Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, yaitu meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan portofolio produk. Maka secara ekonomi mikro memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro.

Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam

kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Akibat hukum perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas terhadap perusahaan yang menggabungkan diri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 107 secara tegas telah ditentukan bahwa dalam hal terjadi Merger, maka yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Apabila pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada perseroan hasil Merger dan pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi saham perseroan hasil Merger.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Penggabungan Perseroan Terbatas Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- ❖ Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar.
- ❖ Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri

bubar, dihitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan.

- ❖ Apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, dihitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Walaupun saat berlakunya secara efektif perseroan yang menggabungkan diri bubar telah dimuat secara tegas dalam Pasal 18 Peraturan Peraturan tersebut, akan tetapi perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini Direksi sudah dinyatakan demisioner, tidak boleh melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merger, sejak tanggal penandatanganan akta Merger. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggungjawab Direksi yang bersangkutan.

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Merger Perseroan Terbatas juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham, menurut Pasal 107 Ayat (3) huruf b dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Perseroan Terbatas terjadi peralihan pemegang saham, yang berbunyi:

"Pemegang saham yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil Merger atau konsolidasi"

Peralihan ini terjadi karena berdasarkan titel umum tanpa adanya perbuatan penyerahan (*levering*), tetapi cukup hanya dengan akta Merger. Dengan demikian hak dan kewajiban ini dan tuntutan terhadap perseroan asal beralih dengan sendirinya



kepada perseroan hasil Merger, termasuk di dalamnya hak tanggungan yang dipegang oleh perseroan asal.

Adanya peralihan pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima Merger sebenarnya bukan merupakan masalah, kecuali bila ada di antara pemegang saham perusahaan yang digabungkan (biasanya adalah pemegang saham minoritas) menolak pelaksanaan Merger, maka kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan cara menjual sahamnya.

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan tentang Merger. Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Karyawan.

Salah satu tujuan Merger Perseroan Terbatas adalah untuk efisiensi perusahaan, untuk terciptanya efisiensi perusahaan,

Perseroan Terbatas hasil Merger tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima Merger, sehingga dengan Merger Perseroan Terbatas dapat mengurangi kesempatan kerja bagi karyawan. Berkurangnya kesempatan kerja guna mencapai efisiensi perusahaan diperlukan adanya rasionalisasi karyawan dengan jalan mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

### 3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kreditur).

Merger Perseroan Terbatas dapat pula menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, khususnya kreditur dan masyarakat. Menurut Pasal 107 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Aktiva dan pasiva yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil Merger atau konsolidasi"

Peralihan aktiva dan passiva yang diakibatkan Merger Perseroan Terbatas, terjadi berdasarkan titel umum tanpa adanya penyerahan (*levering*), tetapi cukup dengan akta Merger. Hak dan kewajiban serta tuntutan terhadap aktiva dan pasiva beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil Merger perusahaan.

Dengan adanya perubahan status hukum asset Perseroan Terbatas tersebut berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan timbulnya atau lahirnya kewajiban Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum Merger dilakukan, seluruhnya menjadi beban dan tanggungjawab Perseroan Terbatas yang menerima Merger. Dengan demikian Perseroan Terbatas yang menerima Merger harus melunasi

semua utang Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum Merger dilakukan.

Perubahan status aktiva dan pasiva tersebut penting karena berkaitan erat dengan keberadaan utang dan piutang perseroan yang terjadi sebelum Merger dilakukan. Hal ini penting ketika Perseroan Terbatas yang menerima Merger menghadapi tuntutan atau gugatan pihak ketiga, khususnya kreditur atas utang yang pernah diikat oleh Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri sebelum Merger dilakukan.

#### 4. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas selain bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan, efisiensi dan efektif, Merger Perseroan Terbatas secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat negatif terhadap persaingan usaha, yaitu:

- Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi Kekuatan pasar "*market power*" menjadi tinggi;
- Semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.

Merger Perseroan Terbatas yang menghasilkan sinergi kerja pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, akan mempunyai kecenderungan untuk penguasaan pasar secara monopoli yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat. Adanya kecenderungan penguasaan pasar secara monopoli dan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya yang diakibatkan Merger perusahaan, pada akhirnya merugikan masyarakat konsumen karena dengan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masyarakat akan membayar lebih

tinggi atas suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

**2. Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.**

Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, dalam praktek menurut responden, baik Perseroan Terbatas yang telah melakukan Merger maupun Notaris yang ikut membantu proses pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, dapat disajikan data sebagai berikut:

- Direksi perseroan yang akan melakukan Merger diri dan menerima Merger masing-masing menyusun usulan rencana Merger. Usulan rencana Merger harus mendapat persetujuan Komisaris (Pasal 7);
- Direksi wajib menyusun rancangan Merger, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger (Pasal 9);
- Direksi wajib mengumumkan ringkasan rencana Merger dalam 2 (dua) surat kabar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan Merger paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan (Pasal 9);
- Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan

anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 14)

- Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Merger, Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merger. Apabila Direksi melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi yang bersangkutan (Pasal 19)
- Direksi perseroan yang akan melakukan Merger wajib menyampaikan surat tercatat rancangan Merger kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33);
- Direksi perseroan hasil perseroan wajib mengumumkan hasil Merger Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya Merger (Pasal 34);

Dalam proses pelaksanaan Merger Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara perseroan dengan Direksi, maka Direksi perseroan wajib menuangkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan Merger. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Komisaris.

Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan, karena Perseroan Terbatas sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*". Sedangkan Komisaris

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam hal Merger Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Dalam rangka menjalankan usaha perseroan, khususnya apabila perseroan tersebut akan melaksanakan Merger perusahaan, maka Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi masing-masing Perseroan menyusun rencana Merger yang dituangkan dalam rancangan Merger. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum atau meminimalkan resiko Merger Perseroan Terbatas yang akan merugikan pihak-pihak tertentu, maka dalam penyusunan rancangan Merger, Direksi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memperhatikan:

- Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap saham perseroan hasil-hasil Merger, dan cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak ketiga, khususnya kreditur terlindungi;
- Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri, hal ini diharapkan agar masalah karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri dapat diperhatikan, sehingga dalam Merger Perseroan Terbatas

yang akan dilaksanakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Merger perseroan, hal ini dimaksudkan agar pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dapat memperoleh haknya, yaitu untuk menjual sahamnya secara wajar dan bebas menawarkan sahamnya kepada pihak yang berminat.

Kemudian, Direksi wajib mengumumkan rancangan Merger Perseroan Terbatas dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 105 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Kewajiban untuk mengumumkan rancangan Merger dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atau kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap Merger perusahaan tersebut.

Setelah rancangan Merger mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi wajib untuk mengajukan persetujuan, menyampaikan laporan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil Merger perusahaan dengan melampirkan rancangan Merger perseroan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Setelah Anggaran Dasar perseroan hasil Merger mendapat persetujuan, telah diterimanya laporan dan pemberitahuan oleh Menteri Kehakiman, Direksi mempunyai kewajiban untuk mengumumkan hasil Merger Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Merger perusahaan dilakukan (Pasal 108

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Ketentuan kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam hal pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam Merger Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- Direksi perseroan yang akan melakukan Merger diri dan menerima Merger masing-masing menyusun usulan rencana Merger. Usulan rencana Merger tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris (Pasal 7);
- Direksi wajib menyusun rancangan Merger, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger (Pasal 9);
- Direksi wajib mengumumkan ringkasan rencana Merger dalam 2 (dua) surat kabar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan Merger paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan (Pasal 9);
- Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perdagangan dan



Perindustrian serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 14)

- Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Merger, Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merger. Apabila Direksi melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi yang bersangkutan (Pasal 19)
- Direksi perseroan yang akan melakukan Merger wajib menyampaikan surat tercatat rancangan Merger kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33);
- Direksi perseroan hasil perseroan wajib mengumumkan hasil Merger Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya Merger (Pasal 34);
- Dalam proses pelaksanaan Merger Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara perseroan dengan Direksi, maka Direksi perseroan wajib menuangkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan Merger. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Komisaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban Komisaris, sedangkan kewajiban dan tanggungjawab Komisaris dalam Merger Perseroan Terbatas adalah memberikan persetujuan terhadap usulan rencana Merger. Sebagai pengawas perusahaan, Komisaris dituntut untuk mengawasi pelaksanaan

Merger perseroan, sehingga dalam Merger tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak. Dengan demikian dalam menyusun rencana Merger, Komisaris harus memberi pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam pelaksanaan Merger.

Direksi bertindak sebagai penyusun rencana Merger Perseroan Terbatas. Dalam menyusun usulan rancangan Merger tersebut, Direksi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, dimana pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas secara tersirat Direksi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Komisaris sebagai pengawas dalam perseroan, dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan usulan rencana Merger yang telah disusun oleh Direksi. Dalam memberikan persetujuan usulan rencana Merger, Komisaris harus memantau apakah kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang lemah telah terakomodasi dalam rencana Merger tersebut. Dalam hal usulan rencana Merger belum atau tidak memuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu, maka Komisaris dapat menolak rencana Merger dengan tidak menyetujui usulan Merger tersebut.

Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan dimulai pada saat penyusunan rencana Merger, karena dalam penyusunan rencana Merger perusahaan, terjadi negosiasi mengenai status pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditur, baik terhadap perusahaan yang menggabungkan maupun terhadap perusahaan yang menerima Merger, serta mencari jalan ke luar dengan menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap kerugian yang akan timbul. Dalam membuat rencana Merger, Direksi harus benar-benar memperhatikan pihak-pihak tertentu, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat, sehingga resiko yang dapat menimbulkan kerugian atas pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas diminimalkan.

Dalam menyusun rencana Merger Perseroan Terbatas, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dicerminkan adanya negosiasi Direksi dalam memperjuangkan kebebasan pemegang saham minoritas untuk menentukan setuju atau menolak Merger Perseroan Terbatas, dan apabila menolak yang bersangkutan memperoleh harga yang wajar atas saham yang dimilikinya.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dapat dilakukan oleh Direksi dengan cara negosiasi untuk meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan apabila pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan, maka Direksi harus memperjuangkan hak-hak yang harus diperoleh karyawan apabila diputuskan hubungan kerjanya.

Sedangkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, Direksi harus mengusulkan adanya perjanjian

pengalihan utang dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger, serta pembayaran utang-utang perusahaan yang menggabungkan diri dilaksanakan tepat waktu.

Penyusunan rencana Merger yang di dalamnya memuat *prospektus* perusahaan hasil Merger. Dalam menyusun *prospektif* perusahaan, Direksi harus memperhatikan etika bisnis dan prinsip-prinsip usaha yang sehat sehingga nantinya perusahaan hasil Meger tidak mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang nantinya dapat merugikan masyarakat dan persaingan usaha.

Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris berakhir setelah Perseroan Terbatas hasil Merger menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi kepada karyawan, pemenuhan utang kepada kreditur, terjualnya saham dari pemegang saham minoritas dengan harga wajar dan untuk jangka panjang mengusahakan agar perusahaan hasil perusahaan hasil Merger tidak melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### **3. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.**

Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, dan kreditur, menurut pendapat beberapa notaris yang telah berpengalaman membantu dalam proses pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, dapat dilihat pada tabel.3.

**Tabel 3.**  
Pendapat Notaris Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditur Dalam Merger Perseroan Terbatas.

N o	Nama Notaris	Pengaturan Merger PT Dlm Peraturan Per- UU-an	Posisi Tawar Para Pihak	Perlindungan Hukum	Perlindungan Hukum	Perlindungan Hukum
				Pemegang Saham Minoritas	Karyawan	Kreditur
1	Anisah, SH	Cukup Memadai	Seimbang	Sesuai dengan ketentuan Ps.3 huruf a dan Pasal 4 PP. 27/1998	Sesuai dg ketentuan Ps. 7 (2) huruf f angka 2 PP.27/1998 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang tenaga kerja.	Sesuai dg Ps. 12 dan Ps.33 PP 27/1998
2	Nanik Kustiyati, SH	Cukup Memberikan Perlindungan	Seimbang	Menganjurkan agar saham dijual dg hubungan yg wajar jika menolak Merger.	Menyelesaikan status karyawan sebelum Merger dilakukan.	Menyelesaikan masalah utang perseroan kpd kreditur sebelum Merger dilakukan.
3	Cahyo Adi, SH	Sudah Cukup	Seimbang	Merger hrs dilakukan sesuai dg ketentuan Ps.4 (3) dan (4) serta Ps.5 PP 27/1998	Perseroan hrs memperhatikan hak karyawan perseroan yg menggabungkan diri sesuai dg peraturan per-UU-an yg berlaku	Ps.33 PP 27/1998 hrs dilakukan secara konsisten.
4	Aris Widhi Hidayat, SH	Disamping dlm PP 27/1998 persyaratan Merger hrs diatur scr jelas dan dirinci dlm akta Merger	Seimbang	Hrs dilakukan sesuai dg Ps.55 UU PT	Hrs dicantumkan scr jelas dlm perjanjian Merger	Dilakukan sesuai dg Ps.33 PP.27/1998
5	Edi Riyanto, SH	Sudah cukup	Tdk seimbang dlm menghada pi hal tsb, Notaris hrs netral dan Merge hrs dilakukan sesuai dg peraturan per-UU-an yg berlaku	Sesuai dg per-UU-an yg berlaku	Pelaksanaan Merger hrs dilakukan sesuai dg peraturan per-UU-an yg berlaku	Dg memenuhi seluruh prosedur yg ditentukan PP 27/1998

Merger Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya senantiasa melahirkan sikap ganda yang saling bertentangan, dimana pada satu sisi Merger perusahaan dapat melahirkan dampak positif bagi perseroan itu sendiri sehingga menjadi besar, maju dan berkembang. Tetapi pada sisi lain Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat. Pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat dari Merger Perseroan Terbatas, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hukum sebagai instrumen harus memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, misalnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas harus diupayakan meminimalkan resiko dan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tersebut. Jadi dalam pelaksanaan Merger perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan, kepentingan kreditur dan kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam Pasal 104 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sudah dijelaskan agar setiap perbuatan Merger perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, saham minoritas, karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat. Bunyi Pasal 104 adalah sebagai berikut:

- (1). Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:
  - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan;
  - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Dalam Merger Perseroan Terbatas kepentingan pemegang saham minoritas perlu diperhatikan karena kedudukannya berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Selain pemegang saham, pihak yang sering dirugikan dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas adalah karyawan. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris. Karyawan dikatakan sebagai pihak yang sangat lemah karena sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan "*policy*" maupun operasional perusahaan, sehingga kepentingan karyawan harus diperhatikan dalam Merger perusahaan, sehingga kepentingan karyawan harus diperhatikan dalam Merger Perseroan Terbatas. Sebab dalam Merger Perseroan Terbatas, seringkali terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dan rasionalisasi usaha.

Pihak lain yang perlu dilindungi adalah kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal yang terkait dalam Merger Perseroan Terbatas. Merger Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan pasiva (*asset*) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger.

Selain hal tersebut diatas, pihak yang harus dilindungi yaitu masyarakat, karena Merger Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, riskan akan timbulnya akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam Merger Perseroan Terbatas diperlukan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selengkapnya berbunyi:

Dalam hal pengabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembuaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Keharusan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, apabila



dalam perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang cukup hanya dapat dilakukan oleh Direksi masing-masing perseroan tanpa mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka tidak mustahil perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas itu dapat merugikan para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, dan apabila telah terlanjur dilakukan maka sulit bagi pemegang saham itu untuk mengoreksinya kembali.

Adanya pemegang saham Mayoritas, menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Selain itu juga, dalam hal pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan adalah hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh organ perseroan. Jadi nampak suatu diskriminasi antara yang kuat dan lemah.

Pemegang saham mempunyai hak perseorangan yang dapat dipertahankan serta dapat dituntut pelaksanaan haknya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan apabila yang

bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak untuk mengajukan gugatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang baik bagi pemegang saham, namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut dalam pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas dapat menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan, meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain hak perseorangan, Undang-Undang juga memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh Direksi ataupun oleh Komisaris.

Pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang saham, ia berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang yang akan merugikan kepentingannya.

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang akan melakukan Merger. Berdasarkan Pasal 104 Ayat (2), Pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana Merger untuk melakukan Merger. Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 104 Ayat (2) untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal

hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar itu tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak menyetujui rencana Merger yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu meminta kepada perseroan agar mengusahakan sahamnya dibeli oleh pihak lain.

Di dalam hal pemegang saham minoritas menolai Merger perusahaan dan tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan Merger perusahaan.

Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu, pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 juga memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan dalam Merger Perseroan Terbatas. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya sehingga sering dirugikan akibat Merger Perseroan Terbatas.

Karyawan dalam perusahaan yang akan melakukan Merger merupakan salah satu pihak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum Merger dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan karyawan dalam hubungan adanya Merger Perseroan Terbatas, yaitu dalam Merger Perseroan Terbatas selalu diikuti dengan pengalihan status karyawan dari perusahaan yang menggabungkan dan dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi usaha tidak jarang sebagian karyawan diputuskan hubungan kerjanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal terjadi Merger Perseroan Terbatas. Merger Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan passiva (*asset*) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger.

Perlindungan bagi kreditur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dijumpai dalam Pasal 104 Ayat (1) huruf b, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 Ayat (2) huruf f angka 3, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 33.

Perlindungan hukum dalam hal Merger Perseroan Terbatas juga dilakukan pada masyarakat. Dengan adanya Merger tersebut, mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu masyarakat harus mendapat perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap persaingan usaha tidak sehat, mendapat angin segar setelah Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana Merger Perseroan Terbatas menjadi salah satu obyek pengaturan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah tersebut terjadi dalam Merger Perseroan Terbatas, antara lain mereka lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi.

Lemah secara struktural maksudnya adalah kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. Menurut sistem hukum positif kita, dari segi "*Corporate Law*", kedudukan karyawan/pekerja di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris, karena karyawan sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan *policy* maupun operasional perusahaan.

Lemah secara finansial maksudnya adalah kedudukannya kuat secara yuridis, misalnya pemegang saham minoritas, tetapi karena ikatan finansial lemah, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya lemah. Sedangkan lemah secara lokasi maksudnya pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan kontraktual, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan, maupun hubungan non kontraktual, misalnya dengan persaingan yang tidak fair.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas.**

#### **1.1. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Merger Perseroan Terbatas adalah :

- Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- PP No.27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengalihan Perseroan Terbatas;
- PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;

Pada prinsipnya pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas secara umum dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam PP No.27 tahun 1998. Akan tetapi jika Perseroan Terbatas yang melakukan Merger tersebut adalah bank, maka tata cara disamping berlaku ketentuan PP No.27 tahun 1998 juga berlaku PP No.28 tahun 1999.

Bahkan jika salah satu Perseroan Terbatas yang melakukan Merger tersebut adalah Perseroan Terbatas yang berstatus terbuka/publik, maka disamping berlaku ketentuan PP No.27 tahun 1998 dan PP No.28 tahun 1999 juga berlaku ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Prosedur Merger Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Merger Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Syarat Formil

- Perseroan yang akan menggabungkan diri dan perseroan yang akan menerima Merger harus membuat usulan rencana Merger yang sekurang-kurangnya memuat:
  - (1) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan Merger;
  - (2) Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
  - (3) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap saham perseroan hasil Merger;
  - (4) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil Merger;

- (5) Neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan Merger; dan
- (6) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain meliputi:
  - a. Neraca proforma perseroan hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari Merger, berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
  - b. Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
  - c. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
  - d. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
  - e. Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil Merger;
  - f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
  - g. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
  - h. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
  - i. Rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
  - j. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
  - k. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.



- (7) Neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil Merger, dalam hal perseroan yang melakukan Merger tergantung dalam satu group atau antar group.
- (8) Persetujuan atas usulan rencana Merger dari komisaris masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan.

- Rancangan Merger yang dibuat bersama oleh Direksi perseroan yang melakukan Merger, yang memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger yang telah disetujui oleh Komisaris dari masing-masing perseroan yang melakukan Merger.
- Pernyataan yang berisi penegasan dari perseroan yang akan menerima Merger mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.
- Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rincian Merger.
- Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan Merger beserta konsep akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Merger.

## 2. Syarat Materiil

Selain harus memenuhi persyaratan formil tersebut, Merger usaha juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yaitu :

- Penggabungan usaha hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- Penggabungan usaha tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas atau pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum pemegang Saham mengenai penggabungan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Penggabungan usaha harus memperhatikan kepentingan kreditur.
- Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dicapai, maka ketentuan mengenai quorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Penggabungan usaha tidak boleh menciptakan persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta penggabungan usaha juga tidak boleh

menimbulkan monopoli dan monopsoni dalam segala bentuk yang merugikan masyarakat.

Disamping beberapa persyaratan tersebut diatas, jika salah satu/lebih perseroan yang melakukan Merger adalah perseroan terbuka/publik, maka harus pula memenuhi ketentuan persyaratan keterbukaan (transparasi) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 84 Undang-Undang No.1 tahun 1995 beserta Peraturan Pemerintahnya.

Jika perseroan yang melakukan Merger adalah bank, maka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, sebagaimana Pasal 4 PP No.28 tahun 1999. Ketentuan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia tersebut, juga berlaku bagi Merger yang dilakukan atas inisiatif BPPN.

Merger usaha di bidang Perbankan diatur dalam ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, terdapat satu Pasal yang mengatur mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, yaitu Pasal 28.

Dalam Pasal 28 tersebut ditentukan sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai Merger, konsolidasi dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Ayat (1) bahwa dalam melakukan Merger, konsolidasi dan akuisisi wajib dihindarkan timbulnya pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula Merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Sedangkan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan yang berkaitan dengan Merger sebagai pelaksanaan dari Pasal tersebut, adalah:

- a. PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
- b. SK. Direksi Bank Indonesia No.321/15/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum;
- c. SK. Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, menentukan bahwa:

#### Pasal 2

Merger dan konsolidasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan:

- (1). Pemegang saham bank yang melakukan Merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil Merger atau bank hasil konsolidasi;
- (2). Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi.

Tata Cara Merger Bank menurut PP No.28 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

a. Inisiatif Untuk Melakukan Merger Bank

Inisiatif untuk melakukan suatu Merger Bank berasal dari beberapa pihak, sebagai berikut:

- Atas inisiatif bank yang akan melakukan Merger tersebut.
- Atas permintaan Bank Indonesia
- Atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus ini adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dari Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dewasa ini badan tersebut sudah terbentuk, yaitu Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Selanjutnya tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan Merger masing-masing atas inisiatif ketiga badan tersebut diatas, dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dari Tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank Umum.

b. Izin Merger Bank

Izin untuk melakukan Merger Bank (dan juga konsolidasi dan akuisisi) mesti diperoleh dari Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian Bank Indonesia sebagaimana dianut oleh Undang-undang Bank Indonesia No.32 Tahun 1999. Sebelumnya izin Merger bank harus diajukan kepada Menteri Keuangan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat dimintakan izin Merger kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Merger dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing perusahaan yang akan dimerger;
- Pada saat terjadinya Merger, maka jumlah aktiva bank hasil Merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia;
- Bank hasil Merger harus memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Direksi dan Komisaris dari bank hasil Merger tidak boleh masuk ke dalam daftar orang tercela (harus lulus *fit and proper test*).

Izin Merger diajukan kepada Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan merger dan satu tembusan dari permohonan izin Merger tersebut dengan pengajuan izin Merger diajukan pula permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil Merger kepada Menteri Kehakiman. Bersamaan dengan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil Merger dilampirkan pula:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
- Akta Merger.

Di samping itu permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia juga dengan melampirkan:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
- Akta Merger.

Dalam proses pelaksanaan Merger ada satu dokumen yang disebut dengan Rancangan Merger. Rancangan Merger bersama-sama dengan konsep akta Merger wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perusahaan. Selanjutnya, konsep akta merger yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan ke dalam Akta Merger yang harus dibuat di dengan Notaris dan dengan memakai bahasa Indonesia. Akta merger tersebut berisikan pokok-pokok sebagaimana terdapat dalam dokumen yang disebut Rancangan Merger itu.

Rancangan Merger di samping berisikan hal-hal sebagaimana terdapat dalam usulan rencana Merger, berisikan pula penegasan dari bank yang akan menerima Merger mengenai penerimaan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.

Sementara usulan rencana Merger yang isinya juga dimuat dalam Rancangan Merger berisikan hal-hal seperti yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (2) PP No.28 Tahun 1999.

Berbeda dengan Merger pada umumnya yang menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 masih dimungkinkan dilakukan melalui likuidasi, maka suatu Merger Bank menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini hanya mungkin dilakukan tanpa likuidasi. Konsekuensinya seluruh aktiva dan pasiva dari Bank yang akan bubar karena Merger beralih karena hukum kepada bank yang eksis setelah Merger. Dengan demikian, jika akhirnya ada bank yang dibubarkan setelah Merger, maka pembubaran tersebut hanyalah

dilakukan secara administratif belaka, tanpa diikuti dengan tindakan likuidasi.

Jika tidak ada tindakan pemberesan terhadap asset-assetnya. Telah dijelaskan bahwa Merger bank ada yang dilakukan dengan mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu merger dianggap bubar sejak tanggal persetujuan dari Menteri Kehakiman. Di samping itu pula yang dilakukan dengan hanya pelaporan kepada Menteri Kehakiman.

Pengaturan tentang kapan saat bubarnya perusahaan juga berbeda, yakni digantungkan kepada sistem mana yang dipilih. Jika yang dipilih adalah sistem dengan mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu Merger dianggap bubar sejak tanggal Persetujuan dari Menteri Kehakiman. Akan tetapi manakala yang dipilih adalah system dimana perubahan anggaran dasar dengan hanya memberi pelaporan saja kepada Menteri Kehakiman, maka bubarnya bank yang melakukan Merger terhitung sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar di dalam daftar perusahaan.

Untuk memenuhi unsur transparansi dari suatu Merger, maka ketentuan perundang-undangan mengharuskan agar dilakukan berbagai pengumuman, khususnya bagi suatu Merger Bank maka Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 mengharuskan adanya pengumuman sebagai berikut:

- Pengumuman dalam Dua Surat Kabar Harian.



- Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan
- Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara
- Pemberitahuan Secara Tertulis
- Pengumuman Secara Lain.

Siapa saja dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Merger asal ada alasan yang sah secara hukum. Akan tetapi selain keberatan umum tersebut, ada beberapa golongan yang mendapatkan perlakuan khusus secara yuridis, jika ingin mengajukan keberatan-keberatan terhadap Merger tersebut yaitu sebagai berikut:

- i. Pihak Pemegang saham Minoritas
- ii. Pihak Kreditor
- iii. Pihak Karyawan
- iv. Pihak tersaing secara tidak sehat.

Akan tetapi, di dalam PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37, perlakuan khusus hanya diberikan kepada pihak kreditor dan pemegang saham minoritas saja. Dalam hal ini pihak kreditor dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas rencana Merger yang telah dituangkan dalam suatu Rancangan Merger. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal ini keberatan tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, guna memperoleh persetujuannya.

Merger diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai Merger, Akuisisi dan Konsolidasi mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 mengenai quorum dan voting dalam RUPS untuk Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.

Pengaturan Merger di dalam Pasal-pasal 102-109 Undang-undang No.1 Tahun 1995, memang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Merger. Dalam pasal-pasal tersebut baru mengatur hal-hal yang pokok saja, yang antara lain mengenai batasan pengertian Merger, rencana dan rancangan Merger, syarat-syarat Merger serta persetujuan RUPS atas rencana Merger. Beberapa ketentuan tersebut, dicantumkan di dalam Pasal 102, yang menentukan bahwa satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada. Rencana Merger dituangkan dalam rancangan Merger yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan Merger yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama perseroan yang akan melakukan Merger;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan Merger atau Peleburan dan Persyaratan Merger;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap saham perseroan hasil Merger;

- d. Rancangan perubahan anggaran dasar hasil Merger apabila ada;
- e. Neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan Merger; dan
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Merger Perseroan Terbatas tersebut hanya dapat dilakukan apabila rancangan Merger disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Di samping beberapa persyaratan tersebut, Merger harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 yang menentukan, bahwa perbuatan hukum Merger perseroan harus memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Jika terdapat pemegang saham minoritas yang menolak rencana Merger, maka perseroan harus memberikan hak pemegang saham minoritas tersebut untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Rancangan Merger tersebut, menurut ketentuan Pasal 105 harus mendapat persetujuan dari RUPS. Keputusan RUPS mengenai Merger perseroan sah, apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76.

Rancangan Merger perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS tersebut dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Apabila rancangan Merger perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS tersebut disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Maka akta perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, juga diatur mengenai akibat hukum yang timbul dari Merger. Dalam Pasal 107 tersebut ditentukan, bahwa dalam hal terjadi Merger maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pembubaran perseroan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Apabila pembubaran perseroan tidak didahului oleh likuidasi maka:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
- b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil Merger atau peleburan.

Setelah proses Merger selesai dilaksanakan, maka Direksi perseroan hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger atau peleburan tersebut dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Merger selesai dilakukan.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara Merger lebih detail dan lengkap menurut Pasal 109 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 24 Februari 1998 telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 yang menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut hanya khusus mengatur Merger, akuisisi dan konsolidasi bagi perusahaan dimana Merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak dilakukan tindakan likuidasi terlebih dahulu. Sebab menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Merger, konsolidasi dan akuisisi dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi.

Syarat-syarat dari Merger, akuisisi dan konsolidasi dari perusahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tersebut pada prinsipnya sama seperti yang terdapat dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi:

#### Pasal 4

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan perseroan pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
  - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
  - (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Merger, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar sahamnya yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

#### Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.

#### Pasal 6

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (3) Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal ini pihak kreditur dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas rencana Merger yang telah dituangkan dalam suatu rancangan Merger. Akan

tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberatan-keberatan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu relatif singkat, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini keberatan tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Umum pemegang Saham guna mendapat penyelesaiannya.

### **1.2. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Pemegang Saham, Karyawan, Kreditur dan Masyarakat, dengan adanya Merger Perseroan Terbatas.**

Perseroan Terbatas yang melakukan Merger dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, antara lain meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan portofolio produk. Dengan memperoleh keuntungan dari adanya Merger perusahaan perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara ekonomi mikro memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro.

Dengan dilakukannya Merger, perseroan akan menjadi lebih kuat, sehingga perseroan yang telah melakukan Merger menjadi lebih besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum baik secara internal maupun eksternal. Secara internal Merger akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi perusahaan sebagai badan hukum, pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan karyawan. Sedangkan secara eksternal Merger mempunyai akibat hukum bagi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, karena status hukum atau keberadaan mereka terhadap perusahaan induknya menjadi berubah yang semula merupakan anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kemudian setelah melakukan Merger beralih menjadi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menerima Merger kecuali diperjanjikan lain.

Akibat hukum perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas terhadap perusahaan yang menggabungkan diri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 107 secara tegas telah ditentukan bahwa dalam hal terjadi Merger, maka yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Apabila pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada perseroan hasil Merger dan pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi saham perseroan hasil Merger.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Penggabungan Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah menetapkan saat berlakunya pembubaran perseroan yang menggabungkan diri. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

- ❖ Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar.
- ❖ Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan.
- ❖ Apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Walaupun saat berlakunya secara efektif perseroan yang menggabungkan diri bubar telah dimuat secara tegas dalam Pasal 18 Peraturan Peraturan tersebut, akan tetapi perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini Direksi sudah dinyatakan demisioner, tidak boleh melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merger, sejak tanggal penandatanganan akta Merger. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggungjawab Direksi yang bersangkutan.

### 1. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Merger Perseroan Terbatas juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham, menurut Pasal 107 Ayat (3) huruf b dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Perseroan Terbatas terjadi peralihan pemegang saham, yang berbunyi:

"Pemegang saham yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil Merger atau konsolidasi"

Peralihan ini terjadi karena berdasarkan titel umum tanpa adanya perbuatan penyerahan (*levering*), tetapi cukup hanya dengan akta Merger. Dengan demikian hak dan kewajiban ini dan tuntutan terhadap perseroan asal beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil Merger, termasuk di dalamnya hak tanggungan yang dipegang oleh perseroan asal.

Adanya peralihan pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima Merger sebenarnya bukan merupakan masalah, kecuali bila ada di antara pemegang saham perusahaan yang digabungkan (biasanya adalah pemegang saham minoritas) menolak pelaksanaan Merger, maka kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan cara menjual sahamnya.

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan tentang Merger. Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak

mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Karyawan.

Salah satu tujuan Merger Perseroan Terbatas adalah untuk efisiensi perusahaan, untuk terciptanya efisiensi perusahaan, Perseroan Terbatas hasil Merger tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima Merger, sehingga dengan adanya Merger Perseroan Terbatas dapat mengurangi kesempatan kerja bagi karyawan. Berkurangnya kesempatan kerja guna untuk efisiensi perusahaan diperlukan adanya rasionalisasi karyawan dengan mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena Merger perusahaan dapat mengakibatkan kesempatan kerja bagi karyawan, maka kepentingan karyawan harus dilindungi. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan, berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah terjadinya Merger yang sudah tentu dalam hal ini banyak peraturan ketenagakerjaan harus dipedomani.

## 3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kreditur).

Merger Perseroan Terbatas dapat pula menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, khususnya kreditur dan masyarakat. Menurut Pasal 107 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Aktiva dan pasiva yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil Merger atau konsolidasi"

Dari ketentuan tersebut di atas, peralihan aktiva dan passiva yang diakibatkan Merger Perseroan Terbatas, terjadi berdasarkan titel umum tanpa adanya penyerahan (*levering*), tetapi cukup dengan akta Merger. Dengan demikian hak dan kewajiban serta tuntutan terhadap aktiva dan pasiva beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil Merger perusahaan.

Dengan adanya perubahan status hukum asset Perseroan Terbatas tersebut berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan timbulnya atau lahirnya kewajiban Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum Merger dilakukan, seluruhnya menjadi beban dan tanggungjawab Perseroan Terbatas yang menerima Merger. Dengan demikian Perseroan Terbatas yang menerima Merger harus melunasi semua utang Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum Merger dilakukan.

Perubahan status aktiva dan pasiva tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan keberadaan utang dan piutang perseroan yang terjadi sebelum Merger dilakukan. Hal ini menjadi lebih penting ketika Perseroan Terbatas yang menerima Merger menghadapi tuntutan atau gugatan pihak ketiga, khususnya kreditur atas segala utang yang pernah diikat oleh Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri sebelum Merger dilakukan.

#### 4. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas selain bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan, efisiensi dan efektif, Merger Perseroan Terbatas secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat negatif terhadap persaingan usaha, yaitu:

- Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi Kekuatan pasar "*market power*" menjadi tinggi;
- Semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.

Merger Perseroan Terbatas yang menghasilkan sinergi kerja pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, memang akan mempunyai kecenderungan untuk penguasaan pasar secara monopoli yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat. Adanya kecenderungan penguasaan pasar secara monopoli dan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya yang diakibatkan Merger perusahaan, pada akhirnya merugikan masyarakat konsumen karena dengan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masyarakat akan membayar lebih tinggi atas suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Merger Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu dapat menimbulkan akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, karyawan, kreditur dan masyarakat, bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.

Merger Perseroan Terbatas dilandasi oleh adanya motivasi untuk meningkatkan sinergi perusahaan, yang diharapkan membawa keuntungan ekonomis, baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya maupun bagi perekonomian secara makro, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat merugikan perekonomian nasional yang akan diuraikan di bawah ini.

Keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam Merger Perseroan Terbatas, agar lebih jelas dipisah menjadi 2 (dua), yaitu keuntungan bagi perusahaan penerima Merger dan keuntungan bagi perusahaan yang menggabungkan diri.

Keuntungan bagi perusahaan penerima Merger, adalah:

- 1) Mendapatkan harta perusahaan yang digabungkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya. Keuntungan ini dapat diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger Perseroan Terbatas yang dilandasi motivasi keuntungan selisih nilai harta kekayaan ini merupakan suatu akibat adanya penilaian harta kekayaan perusahaan yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya sehingga perusahaan penerima Merger akan menerima keuntungan dari selisih penilaian harta kekayaan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut.

Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu :

- a. manajemen perusahaan yang menggabungkan diri tidak mampu menjalankan perusahaan secara maksimal sehingga kinerja perusahaan menjadi rendah dan mengakibatkan harga sahamnya pun menjadi rendah.

- b. Manajemen perusahaan yang menggabungkan diri kurang jeli melihat peluang pasar dan karena itu bidang usaha yang dijalankan kurang diminati investor sehingga harga saham menjadi turun;
  - c. Kebijakan perusahaan yang menggabungkan diri dalam melakukan pembagian laba perusahaan (*dividen*) terbatas sehingga kurang diminati oleh investor dan akibatnya harga saham perusahaan menjadi turun.
- 2) Memperbesar penguasaan pangsa pasar dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak dalam bidang dan tingkat usaha yang sama yang sebelumnya justru merupakan perusahaan saingan (*competitor*). Keuntungan ini dapat diperoleh perusahaan penerima Merger yang dilandasi motivasi meningkatkan penguasaan pangsa pasar. Dengan adanya Merger tersebut, maka penguasaan pasar akan semakin luas, dan hal ini sudah tentu akan meningkatkan daya saing dan terjaganya kekuatan pasar. Merger perusahaan dengan keinginan untuk perluasan pasar ini, akan mengurangi biaya promosi dan biaya pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan yang baru. Selanjutnya biaya-biaya tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan meningkatkan mutu produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing.
- 3) Memperbesar pendapatan (*income*) perusahaan penerima Merger dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang berbeda. Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger Perseroan Terbatas yang dilandasi motivasi penganekaragaman usaha yang merupakan tindak lanjut tercapainya sinergi keuangan.

Kemampuan modal yang semakin kuat, perusahaan akan dapat melakukan peng-anekaragaman bidang usaha. Dengan memiliki keanekaragaman usaha, maka diharapkan suatu perusahaan akan dapat menjaga stabilitas pendapatan (*income*). Sebagai contoh, pada saat sekarang usaha divisi distributor kendaraan bermotor mengalami penurunan omset penjualan, namun pada saat yang sama pada divisi yang lain yaitu divisi penyediaan suku cadang (*spare parts*) dan perbengkelan mengalami peningkatan pendapatan, sehingga secara keseluruhan dari 2 (dua) divisi tersebut *income* atau pendapatan perusahaan dapat tetap terjadi sesuai dengan target yang direncanakan.

- 4) Memperoleh fasilitas pengurangan pajak dengan menggabungkan perusahaan yang mempunyai fasilitas pengurangan pajak karena adanya akumulasi kerugian yang diderita sebelumnya. Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger usaha yang dilandasi motivasi pada keinginan memperoleh keuntungan di bidang perpajakan. Merger perusahaan ini biasanya dilakukan oleh konglomerat atau biasa terjadi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal antara perusahaan sejenis, misalnya perusahaan A adalah perusahaan yang senantiasa memperoleh keuntungan yang besar, sehingga kewajiban pembayarannya pun besar, sedangkan perusahaan B baru meraih keuntungan kecil setelah sekian tahun mengalami kerugian, sehingga perusahaan B masih memiliki fasilitas pembebasan pajak akibat akumulasi karugiannya itu. Dengan melakukan Merger perusahaan B ke dalam perusahaan A, maka keuntungan di bidang perpajakan di peroleh melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan penerima Merger oleh



karena adanya fasilitas pembebasan pajak yang dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri. Selain itu ada kemungkinan Merger perusahaan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menghindarkan diri dari penarikan pajak ganda.

- 5) Meningkatkan efisiensi perusahaan penerima Merger melalui pencapaian "*economic of scale*", yaitu suatu keadaan dimana hasil produksi bertambah dua kali lipat, namun total biaya bertambah tidak sampai dua kali lipat.

Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima Merger melalui Merger usaha yang dilandasi motivasi meningkatkan efisiensi yang akan melahirkan "*sinergi baru*". Secara ekonomi dengan bertambahnya asset yang merupakan faktor-faktor komplementer dalam produksi, maka akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda.

Sedangkan keuntungan bagi perusahaan yang menggabungkan diri adalah:

- Terbebas dari kesulitan keuangan yang selama ini menjadi beban perusahaan, karena melalui Merger perusahaan akan terjadi perubahan struktur permodalan;
- Meningkatnya kemampuan manajemen, yang selama ini justru dihindangi kondisi yang tidak efisien;
- Meningkatnya daya saing produk di pasaran, karena melalui Merger perusahaan akan tercapai "*economics of scale*".

Merger Perseroan Terbatas dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Merger perusahaan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, antara lain meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pasar dan portofolio produk.

Dengan memperoleh keuntungan dari adanya Merger perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara mikro memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro.

Dalam pelaksanaannya apakah Merger Perseroan Terbatas benar-benar dapat mendatangkan keuntungan/ manfaat, atau sebaliknya justru merugikan bagi perekonomian makro suatu negara ? Untuk menjawab pertanyaan di atas seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan ahli ekonomi, dan pada akhirnya melahirkan 3 (tiga) pendapat yang saling berbeda mengenai hal tersebut.

Pendapat **Pertama**: "Merger menguntungkan bagi perekonomian nasional"

Menurut kalangan yang berpendapat bahwa Merger menguntungkan bagi perekonomian nasional, karena Merger dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian nasional suatu negara, karena:

- Merger dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, dan pada

gilirannya akan berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional;

- Merger dapat membantu masalah kekurangan dana pada perusahaan-perusahaan kecil tetapi memiliki teknologi cukup tinggi, sehingga melalui Merger perusahaan-perusahaan itu dapat memperbesar kapasitas produksinya dan mencapai "*economic of scale*".
- Merger akan melahirkan perusahaan-perusahaan besar (raksasa) yang memiliki kemampuan keuangan yang melakukan investasi dan ekspansi usaha, yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional;
- Perusahaan-perusahaan raksasa yang terbentuk melalui Merger akan mampu menghasilkan produk-produk yang bersaing (*competitive*), baik di pasaran ekspor, maupun di pasaran domestik, sehingga pada gilirannya akan mendatangkan cadangan devisa nasional.

Pendapat **Kedua** : "Merger justru merugikan perekonomian nasional"

Pendapat kedua ini menilai praktek Merger sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bahkan justru bisa merugikan atau membahayakan perekonomian suatu negara.

Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan statistik terhadap pelaksanaan Merger perusahaan yang dilaksanakan dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1997 di Amerika Serikat dalam hubungannya dengan situasi ekonomi makro di negara tersebut, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- o Praktek Merger meningkat jumlahnya sejalan dengan naiknya harga saham-saham pada bursa saham, dan sebaliknya pada saat kapasitas produksi nasional meningkat, jumlah praktek merger justru rendah;
- o Praktek Merger meningkat jumlahnya sejalan dengan turunnya tingkat suku bunga pinjaman bank, dan sebaliknya praktek Merger cenderung menurun sejalan dengan naiknya tingkat suku bunga pinjaman bank.

Dilaksanakannya Merger, dengan tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek yang diperoleh dari selisih harga saham di bursa saham dengan nilai harta yang sebenarnya dari perusahaan yang akan digabungkan, dan Merger kurang sekali memberikan perhatian terhadap meningkatnya kapasitas produksi nasional yang melahirkan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro.

Praktek Merger juga meningkat pada saat tingkat suku bunga pinjaman bank rendah. Ini menunjukkan bahwa Merger dilaksanakan untuk tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek, melalui penggunaan dana murah guna membayar kompensasi kepada para pemegang saham yang digabungkan dan memperoleh harta perusahaan yang digabungkan yang nilainya jauh lebih tinggi.

Pendapat **Ketiga** : "Merger dapat menguntungkan bagi perekonomian makro bilamana cenderung negatifnya dibatasi/dihilangkan"

Pendapat ketiga ini merupakan jalan tengah antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Berdasarkan pendapat ketiga bahwa tidak sepenuhnya benar bilamana beranggapan

praktek Merger dipastikan memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro, karena bentuk-bentuk Merger horizontal dan Merger vertical seringkali dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya situasi pasar yang monopolistis melalui penguasaan pangsa pasar secara dominan oleh sebuah atau sekelompok perusahaan. Sebaliknya juga tidaklah tepat mengatakan bahwa seluruh praktek Merger dapat mengakibatkan dampak yang bersifat negatif terhadap perekonomian makro, karena harus diakui bahwa bentuk-bentuk Merger konglomerat sangat bermanfaat untuk mendorong adanya peningkatan efisiensi, pencapaian "*economic of scale*", perluasan usaha melalui diversifikasi, dan peningkatan investasi, yang kesemuanya itu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Merger Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya senantiasa melahirkan sikap ganda yang saling bertentangan, dimana pada satu sisi Merger perusahaan dapat melahirkan dampak positif bagi perseroan itu sendiri sehingga menjadi besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Tetapi pada sisi lain, Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

Setiap perbuatan hukum mengakibatkan akibat hukum, demikian pula perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas

dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi dimensi, yaitu:

- Akibat hukum yang bersifat internal dan materiil baik pada pihak-pihak internal maupun eksternal;
- Akibat hukum yang mempunyai dampak lebih luas yaitu pengaruh yang bersifat ekonomi;
- Akibat yang hampir terasa atau tidak yaitu pengaruh sosial dan psikologis.

Dengan demikian pengaruh yang timbul atas tindakan Merger Perseroan Terbatas dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis dan pengaruh-pengaruh yang bersifat non-yuridis.

Pengaruh yang bersifat yuridis dapat terjadi atau timbul, baik terhadap institusi atau lembaga maupun terhadap pendukung institusional, sedangkan pengaruh-pengaruh yang bersifat non yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum Merger perusahaan.

Pengaruh yang bersifat yuridis terhadap institusi atau lembaga, dengan terjadinya Merger akan menimbulkan pengaruh terhadap eksistensi dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Bagi lembaga yang tetap eksis akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain mengenai organ Perseroan Terbatas dan pendukungnya, tanggungjawab dan kewajiban, hak-hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga. Sedangkan bagi lembaga yang tidak eksis di samping

kedudukannya sebagai badan hukum menjadi bubar, perlu melakukan tindakan-tindakan yuridis terhadap:

1. Kewajiban-kewajiban internal termasuk kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewajiban lain yang harus dipenuhi termasuk pajak yang belum dibayar dan sebagainya.
2. Pengaruh terhadap institusi baik internal maupun eksternal dapat mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyangkut eksistensi Perseroan Terbatas yang bersangkutan apakah tetap eksis atau tidak karena adanya perseroan baru dan sebagainya;
  - b. Adanya likuidasi yang diikuti oleh pembubaran, atau
  - c. Adanya pembubaran tanpa likuidasi.

Ketiganya menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak kecil, baik kepada pemegang saham maupun terhadap pihak ketiga atas transaksi-transaksi yang belum tuntas.

Pengaruh yuridis lainnya adalah pengaruh terhadap pendukung institusional, dalam hal ini hak dan kewajiban bertimbal balik harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang pernah diadakan. Pendukung institusi ini dimaksudkan adalah semua pihak yang mempunyai kaitan dengan institusi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sumber dana, masyarakat pelanggan/konsumen dan negara sebagai penerima pajak.

Pengaruh-pengaruh yang sifatnya non-yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum dari Merger Perseroan Terbatas. Dalam hal ini dibutuhkan perhatian dengan pendekatan yang memerlukan kajian psikologi antara lain mengenai akibat putusnya hubungan kerja pada setiap

tingkat atau jenjang di lembaga yang bersangkutan, sikap pemegang saham lama/baru terhadap Sumber Daya Manusia yang tetap bertahan/dipertahankan dan sebagainya.

Pengaruh yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non-yuridis tersebut di atas, ada kemungkinan menimpa pihak ketiga seperti masyarakat dan kreditur. Pengaruh yang menimpa pihak ketiga justru sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Merger Perseroan Terbatas sebagai perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap Perseroan Terbatas itu sendiri, karyawan, kreditur dan masyarakat, bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.

**2. Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.**

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum pada prinsipnya dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perseorangan. Guna melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki badan hukum, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan Terbatas, yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Dalam menjalankan perusahaan, Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal pengelolaan perseroan, serta berwenang mewakili perseroan. Oleh karena itu keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan, karena Perseroan Terbatas sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa.



tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*". Sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam hal Merger Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Dalam rangka menjalankan usaha perseroan, khususnya apabila perseroan tersebut akan melaksanakan Merger perusahaan, maka Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi masing-masing Perseroan menyusun rencana Merger yang dituangkan dalam rancangan Merger. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum atau meminimalkan resiko Merger Perseroan Terbatas yang akan merugikan pihak-pihak tertentu, maka dalam penyusunan rancangan Merger, Direksi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memperhatikan:

- Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan Merger terhadap saham perseroan hasil-hasil Merger, dan cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak ketiga, khususnya kreditur terlindungi;
- Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri, hal ini diharapkan agar masalah karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri dapat

diperhatikan, sehingga dalam Merger Perseroan Terbatas yang akan dilaksanakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Merger perseroan, hal ini dimaksudkan agar pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dapat memperoleh haknya, yaitu untuk menjual sahamnya secara wajar dan bebas menawarkan sahamnya kepada pihak yang berminat.

Kemudian, Direksi wajib mengumumkan rancangan Merger Perseroan Terbatas dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 105 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Kewajiban untuk mengumumkan rancangan Merger dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atau kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap Merger perusahaan tersebut.

Setelah rancangan Merger mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi wajib untuk mengajukan persetujuan, menyampaikan laporan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil Merger perusahaan dengan melampirkan rancangan Merger perseroan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Setelah Anggaran Dasar perseroan hasil Merger mendapat persetujuan, telah diterimanya laporan dan pemberitahuan oleh Menteri Kehakiman, Direksi mempunyai kewajiban untuk mengumumkan hasil Merger Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari

terhitung sejak Merger perusahaan dilakukan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Ketentuan kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam hal pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut di atas, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam Merger Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- Direksi perseroan yang akan melakukan Merger diri dan menerima Merger masing-masing menyusun usulan rencana Merger. Usulan rencana Merger tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris (Pasal 7);
- Direksi wajib menyusun rancangan Merger, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger (Pasal 9);
- Direksi wajib mengumumkan ringkasan rencana Merger dalam 2 (dua) surat kabar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan Merger paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan (Pasal 9);
- Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam

Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 14)

- Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Merger, Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Merger. Apabila Direksi melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi yang bersangkutan (Pasal 19)
- Direksi perseroan yang akan melakukan Merger wajib menyampaikan surat tercatat rancangan Merger kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33);
- Direksi perseroan hasil perseroan wajib mengumumkan hasil Merger Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya Merger (Pasal 34);
- Dalam proses pelaksanaan Merger Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara perseroan dengan Direksi, maka Direksi perseroan wajib menuangkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan Merger. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Komisaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban Komisaris, sedangkan kewajiban dan tanggungjawab Komisaris dalam Merger Perseroan Terbatas adalah memberikan persetujuan terhadap usulan rencana Merger. Sebagai pengawas

perusahaan, Komisaris dituntut untuk mengawasi pelaksanaan Merger perseroan, sehingga dalam Merger tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak. Dengan demikian dalam menyusun rencana Merger, Komisaris harus memberi pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam pelaksanaan Merger.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas secara tersurat tidak memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Direksi dan Komisaris dalam hal memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, namun dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, Direksi bertindak sebagai penyusun rencana Merger Perseroan Terbatas. Dalam menyusun usulan rancangan Merger tersebut, Direksi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, dimana pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas secara tersirat Direksi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Komisaris sebagai pengawas dalam perseroan, dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan usulan rencana Merger yang telah disusun oleh Direksi. Dalam memberikan persetujuan usulan rencana Merger, Komisaris harus memantau apakah kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang lemah telah

terakomodasi dalam rencana Merger tersebut. Dalam hal usulan rencana Merger belum atau tidak memuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu, maka Komisaris dapat menolak rencana Merger dengan tidak menyetujui usulan Merger tersebut.

Direksi dan Komisaris perseroan, mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas.

Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan dimulai pada saat penyusunan rencana Merger, karena dalam penyusunan rencana Merger perusahaan, terjadi negosiasi mengenai status pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditur, baik terhadap perusahaan yang menggabungkan maupun terhadap perusahaan yang menerima Merger, serta mencari jalan ke luar dengan menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap kerugian yang akan timbul. Dalam membuat rencana Merger, Direksi harus benar-benar memperhatikan pihak-pihak tertentu, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat, sehingga resiko yang dapat menimbulkan kerugian atas pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas diminimalkan.

Dalam menyusun rencana Merger Perseroan Terbatas, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dicerminkan adanya negosiasi Direksi dalam memperjuangkan kebebasan pemegang saham minoritas untuk menentukan setuju atau menolak Merger Perseroan Terbatas, dan apabila menolak

yang bersangkutan memperoleh harga yang wajar atas saham yang dimilikinya.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dapat dilakukan oleh Direksi dengan cara negosiasi untuk meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan apabila pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan, maka Direksi harus memperjuangkan hak-hak yang harus diperoleh karyawan apabila diputuskan hubungan kerjanya.

Sedangkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, Direksi harus mengusulkan adanya perjanjian pengalihan utang dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger, serta pembayaran utang-utang perusahaan yang menggabungkan diri dilaksanakan tepat waktu.

Penyusunan rencana Merger yang di dalamnya memuat *prospektus* perusahaan hasil Merger. Dalam menyusun *prospektuf* perusahaan, Direksi harus memperhatikan etika bisnis dan prinsip-prinsip usaha yang sehat sehingga nantinya perusahaan hasil Meger tidak mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang nantinya dapat merugikan masyarakat dan persaingan usaha.

Kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris berakhir setelah Perseroan Terbatas hasil Merger menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi kepada karyawan, pemenuhan utang kepada kreditur, terjualnya saham dari pemegang saham minoritas dengan harga wajar dan untuk jangka panjang mengusahakan agar perusahaan hasil

perusahaan hasil Merger tidak melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**3. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.**

Pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat dari Merger Perseroan Terbatas, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hukum sebagai instrumen harus memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, misalnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya senantiasa melahirkan sikap ganda yang saling bertentangan, dimana pada satu sisi Merger perusahaan dapat melahirkan dampak positif bagi perseroan itu sendiri sehingga menjadi besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Tetapi pada sisi lain Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas harus diupayakan meminimalkan resiko dan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tersebut. Jadi dalam pelaksanaan Merger perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan



karyawan, kepentingan kreditor dan kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sudah dijelaskan agar setiap perbuatan Merger perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, saham minoritas, karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat. Bunyi Pasal 104 adalah sebagai berikut:

- (1). Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:
  - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan;
  - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Dalam Merger Perseroan Terbatas. Kepentingan pemegang saham minoritas perlu diperhatikan karena kedudukannya berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Selain pemegang saham, pihak yang sering dirugikan dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas adalah karyawan. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah

dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris. Karyawan dikatakan sebagai pihak yang sangat lemah karena sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan "*policy*" maupun operasional perusahaan, sehingga kepentingan karyawan harus diperhatikan dalam Merger perusahaan, sehingga kepentingan karyawan harus diperhatikan dalam Merger Perseroan Terbatas. Sebab dalam Merger Perseroan Terbatas, seringkali terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi dan rasionalisasi usaha.

Pihak lain yang perlu dilindungi adalah kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal yang terkait dalam Merger Perseroan Terbatas. Merger Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan pasiva (*asset*) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger.

Selain hal tersebut diatas, pihak yang harus dilindungi yaitu masyarakat, karena Merger Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, riskan akan timbulnya akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam Merger Perseroan Terbatas diperlukan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selengkapnya berbunyi:

Dalam hal pengabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Keharusan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, apabila dalam perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang cukup hanya dapat dilakukan oleh Direksi masing-masing perseroan tanpa mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka tidak mustahil perbuatan hukum Merger Perseroan Terbatas itu dapat merugikan para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, dan apabila telah terlanjur dilakukan maka sulit bagi pemegang saham itu untuk mengoreksinya kembali.

Adanya pemegang saham Mayoritas, menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegaskan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Selain itu juga, dalam hal pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan adalah hak untuk

mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh organ perseroan. Jadi nampak suatu diskriminasi antara yang kuat dan lemah.

Pemegang saham mempunyai hak perseorangan yang dapat dipertahankan serta dapat dituntut pelaksanaan haknya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak untuk mengajukan gugatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang baik bagi pemegang saham, namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut dalam pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas dapat menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan, meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain hak perseorangan, Undang-Undang juga memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh Direksi ataupun oleh Komisaris.

Pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang saham, ia berhak

mempertahankan haknya terhadap setiap orang yang akan merugikan kepentingannya.

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang akan melakukan Merger. Berdasarkan Pasal 104 Ayat (2), Pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana Merger untuk melakukan Merger. Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 104 Ayat (2) untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar.

Dalam hal hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar itu tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak menyetujui rencana Merger yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu meminta kepada perseroan agar mengusahakan sahamnya dibeli oleh pihak lain.

Sedangkan di dalam hal pemegang saham minoritas menolak Merger perusahaan dan tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan Merger perusahaan.

Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan

sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu, pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 juga memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan dalam Merger Perseroan Terbatas. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya sehingga sering dirugikan akibat Merger Perseroan Terbatas.

Karyawan dalam perusahaan yang akan melakukan Merger merupakan salah satu pihak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum Merger dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan karyawan dalam hubungan adanya Merger Perseroan Terbatas, yaitu dalam Merger Perseroan Terbatas selalu diikuti dengan pengalihan status karyawan dari perusahaan yang menggabungkan dan dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi usaha tidak jarang sebagian karyawan diputuskan hubungan kerjanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal terjadi Merger

Perseroan Terbatas. Merger Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan passiva (*asset*) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil Merger.

Perlindungan bagi kreditur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dijumpai dalam Pasal 104 Ayat (1) huruf b, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 Ayat (2) huruf f angka 3, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 33.

Perlindungan hukum dalam hal Merger Perseroan Terbatas juga dilakukan pada masyarakat. Dengan adanya Merger tersebut, mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu masyarakat harus mendapat perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap persaingan usaha tidak sehat, mendapat angin segar setelah Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana Merger Perseroan Terbatas menjadi salah satu obyek pengaturan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah tersebut terjadi dalam Merger Perseroan Terbatas, antara lain mereka lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi.

Lemah secara struktural maksudnya adalah kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. Menurut sistem hukum positif kita, dari segi "*Corporate Law*", kedudukan karyawan/pekerja di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris, karena karyawan sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan *policy* maupun operasional perusahaan.

Lemah secara finansial maksudnya adalah kedudukannya kuat secara yuridis, misalnya pemegang saham minoritas, tetapi karena ikatan finansial lemah, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya lemah. Sedangkan lemah secara lokalisasi maksudnya pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan kontraktual, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan, maupun hubungan non kontraktual, misalnya dengan persaingan yang tidak fair.

--- Han'S ---



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Merger Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk menyehatkan Perseroan Terbatas telah memasuki era kepastian hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, dimana Merger mendapat pengaturan yang lebih komprehensif. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas selain didasarkan kedua peraturan perundangan tersebut di atas, juga berlaku ketentuan khusus "*lex specialis*". Merger merupakan suatu alternatif bagi pengembangan perusahaan agar diperoleh peningkatan efisiensi, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan memperoleh jalur distribusi, tetapi pada sisi lain Merger Perseroan Terbatas juga dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, Direktur dan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis. Kewajiban dan tanggungjawab Direktur dan Komisaris dimulai sejak penyusunan usulan rencana Merger Perseroan Terbatas sampai dipenuhinya segala hak dari pihak-pihak yang dirugikan yang timbul dari pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas.

3. Dalam Merger Perseroan Terbatas pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan masyarakat mempunyai kedudukan yang lemah, maka pihak-pihak tersebut sering dirugikan. Untuk mengantisipasi akibat negatif Merger Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.1 tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa ketentuan lainnya yang juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas.

## B. SARAN

1. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas tidak hanya dilihat dari meningkatnya sinergi yang ditandai dengan meningkatnya efisiensi, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan memperluas jalur distribusi, tetapi juga diukur dari minimnya akibat yang merugikan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam perusahaan serta cara penyelesaian kewajiban-kewajiban bagi pihak yang dirugikan.
2. Untuk meminimalkan resiko yang merugikan pihak pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan masyarakat serta memberikan perlindungan hukumnya, maka Direktur dan Komisaris harus benar-benar memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah. Oleh karena itu di dalam Merger Perseroan Terbatas selain harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan etika bisnis yang

benar dan yang tak kalah pentingnya adalah Direktur dan Komisaris dapat menyusun rencana Merger dengan mempunyai misi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah secara struktural, finansial dan lokasi tersebut;

3. Mengingat Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perekonomian nasional dan berdampak sangat luas bagi masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian dan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, kepentingan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan dan pihak ketiga (kreditur). Disamping itu proses pelaksanaan merger perseroan terbatas juga harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Pelaksanaan merger perseroan terbatas harus dicegah timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh sebab itu, sebaiknya setiap usulan rencana dan rancangan merger perseroan terbatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari komisi pengawas persaingan usaha.

---- Han'S ----

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Media Sarana Press, 1986.
- Anastasia Diana, *Mengenal E-Business*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2001.
- Andrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Christianto Wibisono, *Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 1991.
- Djafar Assegaff, *Konglomerasi, Taipan dan Koneksi Bisnis*, Jakarta : Warta Ekonomi, 1994.
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.

- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Hardijan Rusli, *Kewajiban-kewajiban Perusahaan di Indonesia*, Jakarta : Huperindo, 1991.
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota, USA : West Publishing Co., 1968.
- J. Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995
- Kartini Mulyadi, *Problematika Pokok Dalam Merger dan Akuisisi*, Jakarta : Gramedia, 1992
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1987.
- , *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Kwik Kian Gee, *Konglomerat Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- , *Saya Bermimpi Menjadi Konglomerat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Marcel Go, *Akuisisi Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

-----, *Managemen Group Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan)*, Jakarta : Nadhia Ceria Indonesia, 1995.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis*. Buku Ketiga, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, *Hukum Bisnis*. Buku Keempat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

-----, *Hukum tentang Merger*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

-----, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

-----, *Hukum Bisnis*, Buku Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

- , *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Pasar Modal Modern, Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Hukum Bisnis, Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nasution S. dan Thomas, *Buku Penuntun Pembuatan Tesis, Skripsi dan Disertasi dan Makalah*, Jakarta : Bina Aksara, 1996.
- Nur Fatah, *Managemen Keuangan, Seri 3*, jakarta : CV.Asona, 1992.
- dan Syafaruddin Alwi, *Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1984.
- , *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Remaja Karya, 1985.
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : Y.A.3. 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung : Alumni, 1981.

- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1986.
- , *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 1989.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1982.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI PRESS, 1986.
- , dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1990.
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985.
- , *Kapita Selecta Hukum Perusahaan*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- , *Kapita Selecta Hukum Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Sudarsanam, *Merger dan Akuisisi*, Yogyakarta : Andi, 1999.



Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1981.

Sunaryati Hartono, *Laporan Akhir Penelitian Pengaruh Konglomerat terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991

-----, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Bina Cipta, 1982.

#### B. MAKALAH/ARTIKEL

Sri Rejeki Hartono, *Aspek Hukum Restrukturisasi*, Seminar nasional Restrukturisasi Perusahaan, diselenggarakan oleh Fak. Hukum UNDIP Semarang dalam rangka Dies Natalis ke-41, Semarang, 28 Nopember 1998;

#### C. PERATURAN-PERATURAN

- Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang- Undang No.10 tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

- Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1998 tentang Bank Umum.
- Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
- Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

--- Han'S ---